



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH ASPEK KEUANGAN TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2010**

SKRIPSI

**Rr. ARINTIKA PRANATANINGRUM
1006814686**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH ASPEK KEUANGAN TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2010**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**RR. ARINTIKA PRANATANINGRUM
1006814686**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rr. Arintika Pranataningrum

NPM : 1006814686

Tanda Tangan :



Tanggal : 4 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Rr. Arintika Pranataningrum
NPM : 1006814686
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi :
Bahasa Indonesia : Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2008 - 2010
Bahasa Inggris : The Effect of Financial Aspect to Performance of Local Government Implementation In Indonesia Budget Year 2008 – 2010

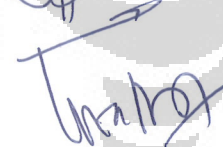
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

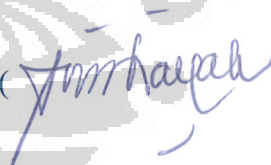
Pembimbing
Debby Fitriyani, S.E., MSM

()

Penguji 1
Eliza Fatima S.E., M.E., CPA

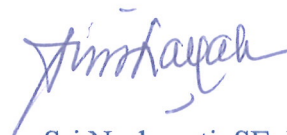
()

Penguji 2
Sri Nurhayati, S.E., MM, S.A.S

()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 5 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi,



Sri Nurhayati, SE, MM, SAS
NIP : 19600317 198602 2001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan jalan kemudahan dari kesulitan-kesulitan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir jaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa di Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Indonesia dalam mencapai gelar Sarjana di bidang Akuntansi. Skripsi ini berisi mengenai pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 - 2010.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya, kepada:

1. Ibu Debby Fitriasari S.E., M.S.M., sebagai pembimbing dan anggota tim penguji yang telah begitu sabar dan teliti serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Eliza Fatimah S.E., M.E., CPA dan Ibu Sri Nurhayati, S.E., MM, S.A.S sebagai penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Para dosen beserta staf pengajar yang telah membimbing, mengajar serta mendidik penulis selama menuntut ilmu di Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
4. Keluarga tercinta, Bapak (R. Roni Tubiyanto S.E., M.M) dan Mama (Sri Ningsih S.E) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada hentinya. Mas Adit yang telah menjadi kakak yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis. Serta adik (Luthfi dan Farhan) yang mengisi hari-hari penulis sehingga lebih berwarna. Semua hal yang kukerjakan ini untuk kalian keluargaku.

5. Sahabat-sahabatku bercerita tersayang (Nur “yayah” Fauziah, Mas Fery, Arif, Nisa, Ipeh) yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis, terutama Yayah terima kasih telah menjadi sahabat, pendengar sekaligus pemberi saran dan motivasi yang ampuh dikala penulis merasa lemah sehingga mampu membangkitkan semangat penulis.
6. Sahabat-sahabat sepembimbing tersayang New Trio Kwek-Kwek (Fauzah Avivi dan Wendy Budianto) terima kasih telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, serta waktu yang diluangkan untuk mengerjakan tugas dan skripsi, akhirnya kita bisa lulus bersama-sama.
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan di kampus tersayang Kobra (Retno, Yulia “vivi” Alfianti, Dinda, Nita, Windy, Aulia, Maria, Qisthi, Hascu, Agus, dan Damar), Adhika, Wynda, Andika, Ghani, Eva, Yhayha, Garit, Itin kecil, Mone, Aldi, Jurek, Bowo, Widy dan Bari terimakasih atas persahabatan tulus yang kalian berikan selama ini, atas kebersamaan dan motivasi paling hebat yang diberikan.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah berjasa dan membantu penulis selama ini, baik selama penulis menempuh pendidikan di Program Ekstensi Akuntansi FEUI.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan laporan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rr. Arintika Pranataningrum
NPM : 1006814686
Program Studi : Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2008 – 2010

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 4 Juli 2012
Yang Menyatakan



(Rr. Arintika Pranataningrum)

ABSTRAK

Nama : Rr. Arintika Pranataningrum
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2008 – 2010

Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 – 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 – 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kata kunci :
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, LPPD, EKPPD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan

ABSTRACT

Name : Rr. Arintika Pranataningrum
Study Program : Accounting
Title : The Effect of Financial Aspect to Performance of Local Government Implementation in Indonesia Budget Year 2008 – 2010

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 – 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation.

Keyword : performance of local government implementation, LPPD, EKPPD, fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio

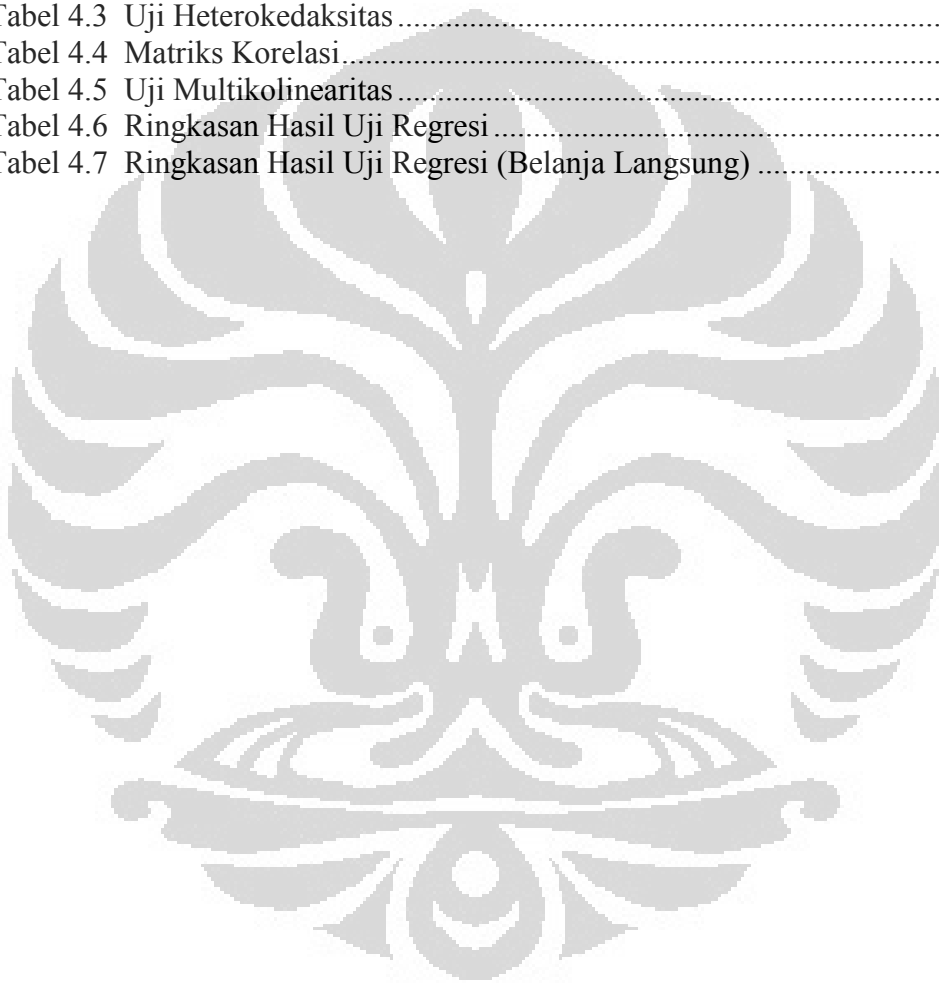
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR PERSAMAAN MATEMATIKA.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.....	8
2.1.1 Definisi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.....	8
2.1.2 Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.....	9
2.1.2.1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPD).....	9
2.1.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPPD).....	10
2.2 Kinerja Pemerintah Daerah.....	12
2.2.1 Definisi Kinerja Pemerintah Daerah.....	12
2.2.2 Pengukuran Kinerja dan Manfaat Pengukuran Kinerja.....	13
2.2.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	15
2.3 Keuangan Daerah.....	16
2.3.1 Definisi Keuangan Daerah.....	16
2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	17
2.3.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Kerangka Pemikiran.....	28
3.2 Hipotesis Penelitian.....	29
3.3 Model Penelitian.....	31
3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel.....	32
3.4.1 Variabel Dependen.....	32
3.4.2 Variabel Independen.....	32
3.4.3 Variabel Kontrol.....	33
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
3.6 Jenis dan Sumber Data.....	35

3.7	Metode Pengolahan Data.....	36
3.7.1	Analisis Deskriptif.....	36
3.7.2	Uji Normalitas	36
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	36
3.7.3	Uji Model Regresi	38
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	40
4.1	Statistik Deskriptif Sampel.....	40
4.1.1	Variabel Dependen	40
4.1.2	Variabel Independen.....	41
4.1.3	Variabel Kontrol.....	43
4.2	Uji Beda Rata-Rata.....	43
4.3	Uji Normalitas	44
4.4	Uji Asumsi Klasik	45
4.4.1	Uji Heteroskedastisitas	45
4.4.2	Uji Multikolinearitas	45
4.4.3	Uji Autokorelasi	46
4.5	Uji Model Regresi	47
4.5.1	Uji Signifikansi <i>F-test</i>	47
4.5.2	Uji Determinasi R^2 (<i>Adjusted R²</i>).....	48
4.5.3	Uji Signifikansi <i>T-test</i>	48
4.5.3.1	Variabel Independen.....	48
4.5.3.2	Variabel Kontrol.....	50
4.6	Analisis Tambahan.....	51
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya	52
	DAFTAR REFERENSI.....	54
	LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pemda Berdasarkan Kriteria Prestasi Skor EKPPD tahun 2008 – 2010	5
Tabel 2.1 Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan	12
Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian	34
Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel	35
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	40
Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Rata-Rata.....	44
Tabel 4.3 Uji Heterokedaksitas	45
Tabel 4.4 Matriks Korelasi.....	45
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Uji Regresi	47
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Regresi (Belanja Langsung)	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	29
Gambar 4.1 Skor EKPPD.....	41
Gambar 4.2 Rata-Rata Skor EKPPD Tahun 2008 - 2010.....	41
Gambar 4.3 Normalitas	44



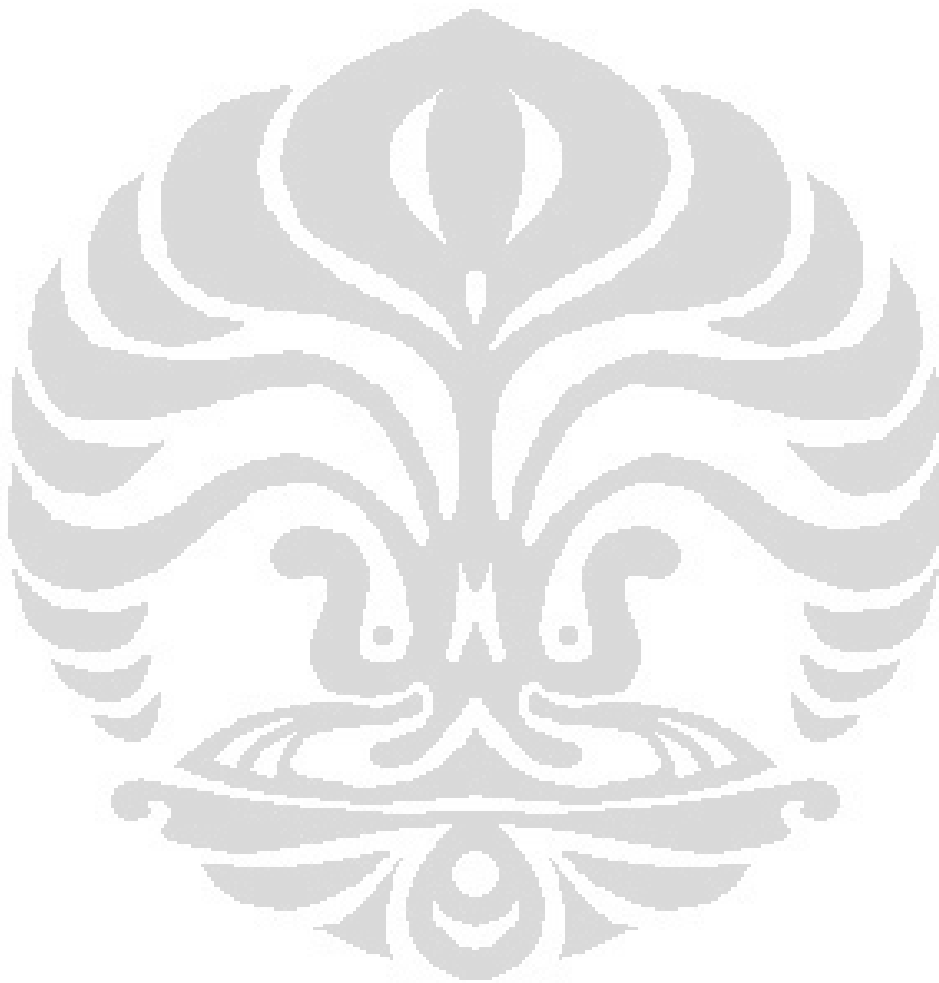
DAFTAR PERSAMAAN MATEMATIKA

3.1 Model Penelitian	31
3.2 Rasio Desentralisasi Fiskal	32
3.3 Rasio Efektivitas PAD	32
3.4 Rasio Aktivitas	33
3.5 Rasio Pertumbuhan	33
3.6 Ukuran Pemda.....	33
3.7 Kompleksitas Wilayah	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Komponen EKPPD.....	59
Lampiran 2 Daftar Nama Pemda.....	60



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2004, pengelolaan pemerintah daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, telah memasuki era baru. Hal ini terlihat dari diperbaharainya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU No. 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU yang baru lebih ditegaskan masalah transparansi dalam hal pemerintahan daerah, pemilihan aparatur pemerintahan, dan pelaporan keuangan. UU No. 32/2004 menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka tanggung jawab yang diterima oleh Pemda menjadi semakin besar karena pemda harus mengelola sumber daya yang ada pada daerahnya dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan secara lebih efektif dan efisien.

Menurut Halim (2001) dalam Rusydi (2010), suatu daerah dapat dikatakan mampu melakukan otonomi dan desentralisasi bila memiliki 2 ciri. Pertama, Pemda memiliki kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Kedua, ketergantungan Pemda kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan utama sehingga peranan Pemda menjadi lebih besar. Dengan kata lain, PAD harus menjadi basis utama penerimaan daerah dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat agar daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada Pemda yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi (Vitawati, 2008). Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif, sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik.

Terkait dengan desentralisasi fiskal, elemen ini mendukung pelaksanaan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada Pemda untuk menggali pendapatan daerahnya sendiri melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan tujuan agar Pemda mampu menggali sumber pembiayaan lokal dan membuat keputusan belanja secara mandiri sesuai dengan kebutuhan aktual dari daerahnya masing-masing. Dengan demikian, penyerahan desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan pengelolaan finansial yang baik oleh Pemda. Berdasarkan UU No. 33/2004 pasal 5 ayat (2), sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan Pemda dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Keseluruhan pendapatan ini harus bisa dikelola secara baik dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun secara mandiri oleh Pemda dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya masing-masing.

Selain dikelola secara baik, keuangan daerah juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat UU otonomi daerah. Pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara/masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas keuangan tersebut adalah dalam bentuk pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP No. 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa dengan adanya LKPD maka para pengguna laporan keuangan dapat membandingkan kinerja keuangan dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat

kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja Pemda.

Selain LKPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga dapat digunakan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dijelaskan bahwa ruang lingkup LPPD berisi mengenai informasi – informasi penyelenggaraan Pemda yang terkait dengan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dengan adanya peraturan tersebut maka Pemda harus melakukan pengungkapan terhadap urusan wajib, urusan pilihan dan tugas-tugas lain yang telah dilaksanakannya dalam LPPD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengungkapan informasi yang tertuang dalam LPPD digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan acuan untuk menilai kinerja setiap Pemda dalam bentuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD merupakan evaluasi kinerja Pemda dalam bentuk skor secara nasional dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) mengenai Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi pencapaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Di dalam EKPPD tersebut dijelaskan bahwa peringkat hasil EKPPD secara nasional menggunakan *template* analisis indeks dengan hasil akhir berupa “Indeks Hasil Evaluasi LPPD” yang selanjutnya disebut sebagai skor kinerja. Skor kinerja ini merupakan gabungan dari “Indeks Capaian Kinerja” dan “Indeks Kesesuaian Materi” setelah melalui proses pembobotan. Kriteria penilaian yang ditetapkan terhadap skor kinerja dibagi ke dalam empat tingkatan prestasi.

Tabel 1.1 Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Kriteria Prestasi Skor EKPPD Selama Tahun 2008 – 2010

No.	Kriteria Prestasi	Skor Kinerja	2008	2009	2010
1	Sangat Tinggi	3,00 s.d 4,00	0	0	24
2	Tinggi	2,00 s.d 3,00	310	351	346
3	Sedang	1,00 s.d 2,00	106	74	56
4	Rendah	0,00 s.d 1,00	22	5	6
Total			438	430	432

Sumber : Hasil Skor EKPPD 2008-2010 yang telah diolah

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 24 Pemda tingkat kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kinerja sehingga memperoleh prestasi yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prestasi sangat tinggi menunjukkan bahwa ke-24 Pemda mempunyai kinerja yang sangat baik dilihat dari berbagai kriteria penilaian EKPPD.

Penelitian mengenai kinerja Pemda telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dengan indikator kinerja yang dilihat dari kinerja ekonomi maupun keuangan. Lin *et al.* (2010) melakukan penelitian terkait kinerja ekonomi Pemda di Cina pada tahun 2005 dan 2006. Lin *et al.* (2010) menemukan bahwa pendapatan pemda, ekspor, impor, GDP, dan *income of family* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi Pemda. Cahya (2010) meneliti pengaruh rasio efektifitas PAD terhadap kinerja BAPPEDA kabupaten Tasikmalaya tahun 2005 - 2008. Kinerja pada penelitian ini diukur dengan indikator masukan, keluaran, hasil, proses manfaat, dan dampak. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa rasio efektivitas keuangan berpengaruh positif pada kinerja Pemda.

Sedangkan penelitian mengenai kinerja yang menggunakan data LPPD belum banyak dilakukan. Dalimunthe (2010) melakukan review terkait dengan kinerja dari Pemda dengan menggunakan data yang bersumber dari LPPD, sedangkan cara mengevaluasi kinerjanya berdasarkan PP No. 6/2008. Penelitian lain terkait LPPD lainnya diantaranya dilakukan oleh Febriana (2010) dan Dhuanovawati (2010) yang melakukan analisis deskriptif dengan LPPD sebagai sumber utama. Sedangkan Mustikarini (2012) melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemda meliputi karakteristik pemda dan

temuan audit. Dalam penelitian Mustikarini (2012), kinerja diukur dengan skor dari EKPPD untuk tahun anggaran 2007. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, dan ketergantungan pada pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif sedangkan belanja daerah dan temuan audit berpengaruh negatif.

Penelitian ini mencoba untuk melanjutkan penelitian Mustikarini (2012) dengan lebih berfokus pada pengaruh faktor kinerja keuangan terhadap kinerja Pemda yang dilihat dari nilai skor EKPPD untuk tahun anggaran 2008 – 2010. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio-rasio yang dipilih dan disesuaikan dengan IKK yang ada dalam LPPD, dimana IKK-IKK tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi unsur penilaian Skor EKPPD. Rasio-rasio yang dipilih tersebut juga merupakan rasio-rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan (Widodo, 2001 dalam Halim, 2002) dan (Mahmudi, 2007 dalam Husna, 2011)

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama 2008 - 2010?
2. Apakah rasio efektifitas PAD berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama 2008 - 2010?
3. Apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama 2008 - 2010?
4. Apakah rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama 2008 - 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Membuktikan rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama 2008 - 2010.
2. Membuktikan rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama 2008 - 2010.
3. Membuktikan rasio aktivitas berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama 2008 - 2010.
4. Membuktikan rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama 2008 - 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

1. Pemerintah Pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan Pemda di Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja Pemda. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan yang akan diambil Pemerintah terkait dengan desentralisasi fiskal.
2. Pemerintah Daerah, penelitian ini memberikan gambaran mengenai variabel kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja suatu Pemda kabupaten/kota sehingga dapat dijadikan masukan untuk dapat memperbaiki kinerja Pemda yang dirasa kurang memuaskan.
3. Akademis, penelitian ini bisa menjadi literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang kinerja Pemda, khususnya tentang variabel yang berpengaruh terhadap kinerja suatu Pemda kabupaten/kota yang masih sangat minim.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya meliputi :

1. Aspek keuangan hanya dilihat dari 4 (empat) rasio.
2. LKPD kabupaten/kota yang mempunyai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tahun 2008 - 2010.
3. Mempunyai Skor Kinerja yang ada dalam EKPPD.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pemaparan penelitian ini ke dalam lima bab, yaitu : pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori-teori tentang kinerja Pemda, laporan kinerja Pemda, evaluasi kinerja Pemda, pemeriksaan laporan keuangan dan penelitian sebelumnya.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, dimulai dari kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, model penelitian, operasionalisasi variabel, desain pengambilan dan ukuran sampel serta data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB 4 : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari analisis statistik deskriptif dan regresi hasil penelitian. Dari hasil pengolahan data akan digunakan untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variable dependen dan penjelasan mengenai implikasinya.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memaparkan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis hasil penelitian. Pada bagian ini dijelaskan juga keterbatasan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti memberikan saran bagi penelitian dimasa yang akan datang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

2.1.1 Definisi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Pengertian otonomi daerah menurut beberapa sumber diantaranya :

1. Otonomi daerah berdasarkan pasal 18 UUD 1945 amandemen II tahun 2000 adalah hak dan wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dimana tata cara penyelenggaraannya diatur dalam undang-undang.
2. Otonomi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengertian desentralisasi menurut UU No. 32/2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Sasana, 2006). Mardiasmo (2002, 1) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal menjadi alternatif jawaban dari tuntutan otonomi daerah dan desentralisasi, mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan juga pelimpahan beberapa wewenang dari pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mardiasmo : 2002, 59), yaitu:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

2. menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan
3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.1.2 Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara/masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah (Pemda). Oleh karenanya, Pemda harus melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah pusat dan masyarakat.

2.1.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan merupakan catatan informasi keuangan organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 tentang Pelaporan Keuangan paragraf 9 dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri No. 13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 (PP No. 56/2005) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 3 dijelaskan bahwa informasi keuangan daerah yang harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat harus akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cakupan informasinya dijelaskan pada Pasal 4 yaitu berupa :

1. APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota;
2. neraca daerah;
3. laporan arus kas;
4. catatan atas laporan keuangan daerah;
5. dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
6. laporan keuangan perusahaan daerah; dan
7. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Semua informasi keuangan tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

2.1.2.2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Pasal 1, LPPD merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Dalam Pasal 9 PP No. 3/2007 tersebut juga dijelaskan bahwa sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat, LPPD dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan adanya LPPD diharapkan Pemda mampu menjelaskan kegiatan penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan, serta tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Rincian lebih lanjut mengenai ruang lingkup LPPD juga dijelaskan dalam PP No. 3/2007 Pasal 2 yaitu mencakup penyelenggaraan:

1. Urusan Desentralisasi, terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang dapat dilihat pada Tabel 2.1
2. Tugas Pembantuan, yang meliputi :
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
 - b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
 - c. tugas pembantuan kepada desa.
- a. Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi :
 - a. kerjasama antar daerah;
 - b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
 - c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
 - d. pembinaan batas wilayah;
 - e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
 - g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Tabel 2.1 Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Desentralisasi

Urusan Wajib			
No.	Bidang	No.	Bidang
1.	Pendidikan	14.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.	Kesehatan	15.	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3.	Lingkungan hidup	16.	Perhubungan
4.	Pekerjaan umum	17.	Komunikasi dan informasi
5.	Penataan ruang	18.	Pertanahan
6.	Perencanaan pembangunan	19.	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
7.	Perumahan	20.	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
8.	Kepemudaan dan olahraga	21.	Pemberdayaan masyarakat desa
9.	Penanaman modal	22.	Sosial
10.	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	23.	Kebudayaan
11.	Kependudukan dan catatan sipil	24.	Statistik
12.	Ketenagakerjaan	25.	Kearsipan
13.	Ketahanan pangan	26.	Perpustakaan
Urusan Pilihan			
No.	Bidang	No.	Bidang
1.	Kelautan dan perikanan	5.	Pariwisata
2.	Pertanian	6.	Industri
3.	Kehutanan	7.	Perdagangan
4.	Energi dan sumber daya mineral	8.	Ketransmigrasian

Sumber: PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1 Definisi Kinerja Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan urusan pemerintahan pada tingkatan daerah, pembangunan, dan juga layanan sosial

masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerahnya untuk dinilai oleh pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui bagaimana kinerja dari Pemda tersebut sehingga dapat melihat pencapaian atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah.

Menurut Mahsun (2006 : 25) dalam Cahya (2010), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

2.2.2 Pengukuran Kinerja dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja organisasi merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap keefektivan perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009).

Ulum (2009) menyatakan bahwa dalam melakukan pengukuran kinerja, informasi yang digunakan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu keuangan dan non keuangan. Hal ini karena kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga pengukuran secara keuangan saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Lebih lanjut, Ulum (2009) menjelaskan sebagai berikut :

1. Informasi Keuangan

Salah satu cara pengukuran kinerja adalah menggunakan informasi keuangan. Pada penilaian laporan kinerja keuangan, pengukuran didasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan analisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada varians pendapatan dan varians pengeluaran.

2. Informasi Non Keuangan

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya karena dapat menambah keyakinan terhadap kualitas pengendalian manajemen. Jenis informasi non keuangan dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variable*). Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kunci kesuksesan suatu organisasi.

Dalam pengukuran kinerja pemda, digunakan istilah Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk operasionalisasi evaluasi atas aspek-aspek umum yang disepakati oleh para pengambil kebijakan. IKK menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit organisasi. Indikator kinerja menurut Mardiasmo (2006) adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Kegunaan indikator kinerja ini adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dapat disimpulkan bahwa IKK digunakan sebagai capaian kinerja yang spesifik, definitif dan dapat diperbandingkan.

Sedangkan manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut (Ulum: 2009, 22):

1. memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;

2. memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
4. sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
5. sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
6. membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan terpenuhi;
7. membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan
8. memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau biasa disingkat EKPPD merupakan analisis pengumpulan data yang dilakukan terhadap sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis. Dalam PP No. 6/2008 dijelaskan bahwa EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengukuran dalam EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan wilayah provinsi.

Dalam PP No. 6/2008 tersebut juga dijelaskan sumber informasi yang digunakan dalam EKPPD yaitu :

1. Sumber informasi utama adalah LPPD.
2. Sumber informasi pelengkap dapat berupa:
 - a. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - b. Informasi keuangan daerah.
 - c. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah.
 - d. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
 - e. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan

pemerintahan daerah.

- f. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus.
- g. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.
- h. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen.
- i. Tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD.
- j. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Informasi yang diungkapkan dalam EKPPD harus sesuai dengan IKK, karena sistem pengukuran kinerja pada EKPPD salah satunya menggunakan IKK dalam penilaian yang terintegrasi dengan pengukuran kinerja oleh Pemerintah Pusat.

2.3. Keuangan Daerah

2.3.1 Definisi Keuangan Daerah

Dalam Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, keuangan (ketersediaan dana) merupakan hal yang mutlak, karena tidak mungkin terlaksana suatu program atau kegiatan bila terjadi ketiadaan dana. Hal ini membuat pemerintah pusat harus memperoleh dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat dan pembiayaan untuk pemerintah daerah dengan melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah biasa disebut dengan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penjelasan lebih lanjut mengenai keuangan daerah dijelaskan dalam Permendagri No. 13/2006 dimana dalam ketentuan umumnya dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud hak adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban

merupakan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 (PP No. 58/2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Dalam PP No. 58/2005 Pasal 21 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

- Hasil pajak daerah.
- Hasil retribusi daerah.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak :

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
- Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam :

- Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana

reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- Penerimaan pertambangan. umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
- Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam UU No. 32/2004 Pasal 161 dijelaskan bahwa DAU dialokasikan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam UU No. 32/2004 Pasal 162 dijelaskan bahwa DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk :

- mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional;
- mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

- 1) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
- 2) Pendapatan Dana Darurat merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.
- 3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Jenis Pajak Daerah dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU No. 28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah untuk kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.¹
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.¹

2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang

¹ Berdasarkan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan sumber pendapatan pemerintah daerah.kabupaten/kota. Perubahan itu terjadi pada PBB dan BPHTB yang sebelumnya berada pada bagian dana perimbangan sekarang berubah menjadi bagian dari PAD kabupaten/kota.

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Permendagri No. 13/2006.

Belanja menurut kelompoknya terdiri dari :

a. belanja tidak langsung :

- 1) belanja pegawai;
- 2) bunga;
- 3) subsidi;
- 4) hibah;
- 5) bantuan sosial;
- 6) belanja bagi hasil;
- 7) bantuan keuangan; dan
- 8) belanja tidak terduga.

b. belanja langsung :

- 1) belanja pegawai;
- 2) belanja barang dan jasa; dan
- 3) belanja modal.

Sedangkan belanja menurut klasifikasi ekonomisnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP No. 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari :

a. belanja operasi;

- 1) belanja pegawai
- 2) belanja barang
- 3) bunga
- 4) subsidi
- 5) hibah
- 6) bantuan sosial

b. belanja modal;

- 1). belanja aset tetap
- 2). belanja aset tetap lainnya

c. belanja tak terduga;

d. transfer.

3. Pembiayaan Daerah

Menurut PP No. 58/2005 Pasal 28 pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- a. penerimaan pembiayaan mencakup :
 - 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) pencairan dana cadangan;
 - 3) hasil penjualan kekayaan daerah;
 - 4) penerimaan pinjaman; dan
 - 5) penerimaan kembali pemberuan pinjaman.
- b. pengeluaran pembiayaan mencakup :
 - 1) pembentukan dana cadangan;
 - 2) penyertaan modal pemerintah daerah;
 - 3) pembayaran pokok utang; dan
 - 4) pemberian pinjaman.

2.3.3 Kinerja Keuangan Daerah

Salah satu cara pengukuran kinerja yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting yang menjadi bahan perbandingan dalam menemukan kondisi tren yang terjadi. Dalam pemerintahan, melakukan analisis rasio tidak dapat menggunakan rasio-rasio yang biasa digunakan dalam perusahaan pada umumnya. Hal ini karena pengukuran kinerja yang berbeda. Umumnya kegiatan operasi dalam perusahaan berorientasi pada laba, berbeda halnya dengan sektor pemerintahan yang ingin dicapai bukanlah laba tetapi kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga cara pengukurannya pun berbeda.

Analisis rasio pada Pemerintahan Daerah dikembangkan dari data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD

belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2002:127-130).

Pengukuran dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan antar pemerintah daerah untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Suprpto : 2007).

Tujuan melakukan analisis rasio keuangan menurut Widodo (2001) dalam Halim (2002 : 126) untuk :

1. mengukur kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
2. mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasi pendapatan daerah;
3. memantau aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
4. melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Selanjutnya Widodo (2001) dalam Halim (2002) menjelaskan bahwa terdapat beberapa analisis rasio keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan Pemda terhadap sumber dana eksternal (Pemerintah Pusat/Provinsi dan Kreditur)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Penerimaan PAD yang Ditetapan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja wajib (BW), dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Dimana BD terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya. Sedangkan BW dalam hal ini bisa berasal dari jumlah belanja rutin dan dana alokasi khusus (DAK).

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

4. Rasio Aktivitas²

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

5. Rasio Pertumbuhan²

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{X_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}_{X_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Belanja Rutin}_{X_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan}_{X_{n-1}}}$$

Pengukuran kinerja keuangan di atas juga menjadi IKK dalam pengukuran skor EKPPD. Pengukuran kinerja keuangan dalam IKK terdiri atas aspek-aspek yang ruang lingkup dari setiap aspeknya terbagai atas beberapa fokus. Aspek-aspek ini dijelaskan dalam lampiran Permendagri No. 73/2009. Beberapa aspek (fokus) yang memiliki kesamaan dengan rasio – rasio di atas yaitu :

²Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 maka perhitungan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan dapat disesuaikan dengan mengganti belanja rutin dan belanja pembangunan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

1. Aspek intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah yang berfokus pada besaran PAD. Fokus ini sesuai dengan rasio kemandirian, namun pada IKK agak sedikit berbeda pada bagian denumeratornya yaitu total pendapatan daerah. Pada Mahmudi (2007) dalam Husna (2011) rasio ini bernama rasio desentralisasi fiskal dimana rumusnya adalah :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal}^3 = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Penerimaan daerah}} \times 100\%$$

2. Aspek pengelolaan potensi daerah yang berfokus pada peta potensi daerah. Fokus ini sama dengan rasio efektifitas PAD.
3. Aspek pengelolaan potensi daerah juga memiliki fokus lain yaitu peningkatan PAD yang sesuai dengan rasio realisasi pertumbuhan PAD; dan
4. Aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil berfokus pada alokasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fokus ini dapat dikatakan sesuai dengan rasio aktivitas, dimana rumus yang dipakai yaitu:

$$\text{Belanja Langsung terhadap total APBD} = \frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kinerja keuangan Pemda telah dilakukan oleh banyak peneliti. Florida (2006) mengukur kinerja keuangan Pemda dengan menggunakan tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah dan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Cahya (2010) meneliti pengaruh rasio efektifitas PAD

³ Pengukuran dengan rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemda dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini berarti daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat.

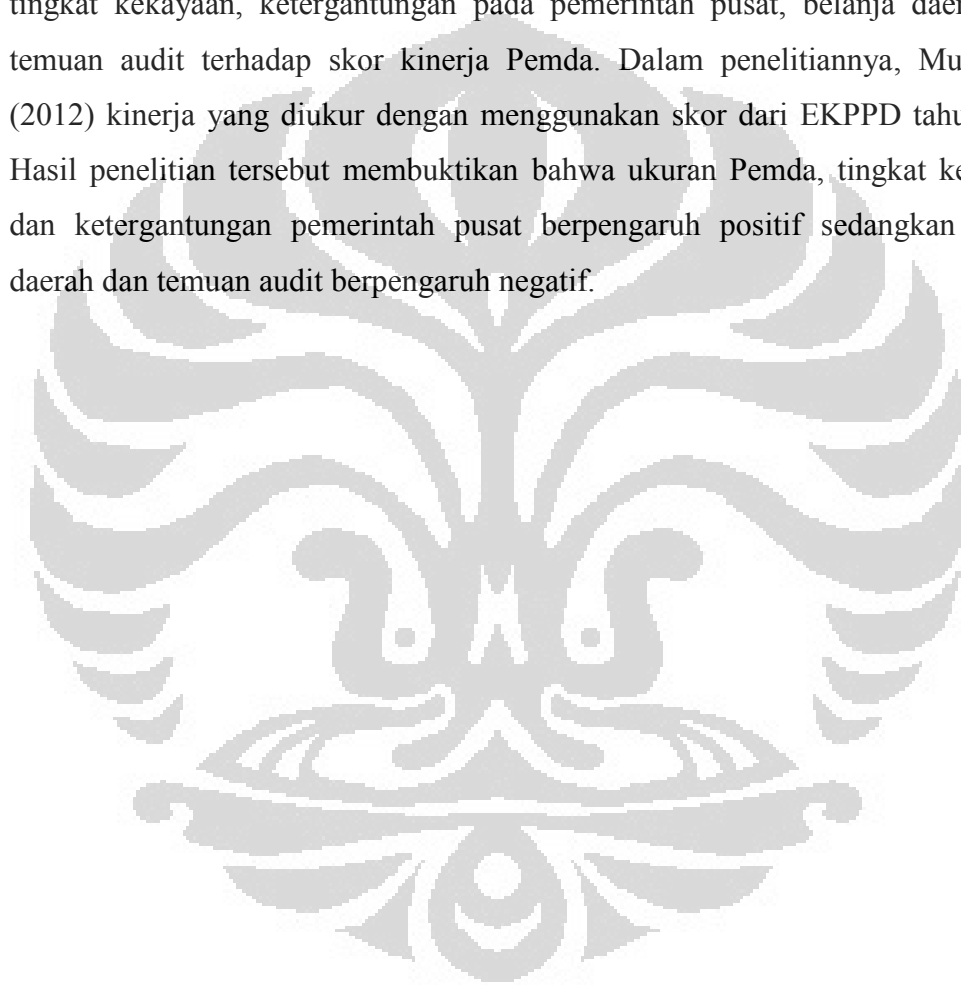
terhadap kinerja BAPPEDA kabupaten Tasikmalaya tahun 2005 - 2008. Dalam penelitiannya, Cahya (2010) mengukur kinerja pemda dengan indikator kinerja seperti : indikator masukan, proses, keluaran, hasil manfaat dan dampak. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Penelitian lain terkait rasio keuangan Pemda dilakukan oleh Ardhini (2011) yang menghubungkan kinerja keuangan dengan belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan desain penelitian asosiatif kausal dengan jumlah sampel 35 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2007 - 2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Selain penelitian di Indonesia, penelitian mengenai kinerja keuangan Pemda juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti di luar negeri. Lin *et al.* (2010) melakukan penelitian terkait kinerja ekonomi pemerintah daerah di Cina pada tahun 2005 dan 2006. Lin *et al.* (2010) menemukan bahwa pendapatan pemda, ekspor, impor, GDP, dan *income of family* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi Pemda. Coll *et al.* (2006) meneliti pengaruh *tax, self-generate revenue, grant, leverage*, dan belanja daerah terhadap kinerja Pemda di Spanyol (rasio efisiensi). Hasil penelitian tersebut menunjukkan hanya *grant* dan *leverage* yang berpengaruh terhadap kinerja Pemda di Spanyol tahun 1995.

Selain kinerja keuangan, di Indonesia penelitian kinerja Pemda juga telah dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dalimunthe (2010) melakukan review terkait dengan kinerja dari Pemda dimana cara mengevaluasi kinerjanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan objek penelitian Pemkot Medan, Pemkab Wonogiri dan Pemkot Dumai untuk tahun anggaran 2008. Dari ketiga belas aspek yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Pemkot Medan memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan Pemda lainnya. Febriana (2010) menganalisis tingkat kinerja yang dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada empat Pemkot, yaitu Pemkot Balikpapan, Medan, Sorong, dan Mataram untuk tahun anggaran 2008. Secara keseluruhan, Pemda Balikpapan memiliki kinerja paling baik atas pencapaian SPM. Dhuanovawati (2010) menganalisis hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah pada Pemda di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2008, dimana dalam mengevaluasinya menggunakan PP No. 6/2008. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 32 Pemda kategori prestasi tinggi, 1(satu) Pemda kategori prestasi sangat tinggi, dan hanya 2 (dua) Pemda yang mendapat kategori prestasi sedang.

Jika 3 (tiga) penelitian sebelumnya lebih bersifat deskriptif, Mustikarini (2012) melakukan penelitian kuantitatif mengenai pengaruh ukuran Pemda, tingkat kekayaan, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit terhadap skor kinerja Pemda. Dalam penelitiannya, Mustikarini (2012) kinerja yang diukur dengan menggunakan skor dari EKPPD tahun 2007. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ukuran Pemda, tingkat kekayaan, dan ketergantungan pemerintah pusat berpengaruh positif sedangkan belanja daerah dan temuan audit berpengaruh negatif.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

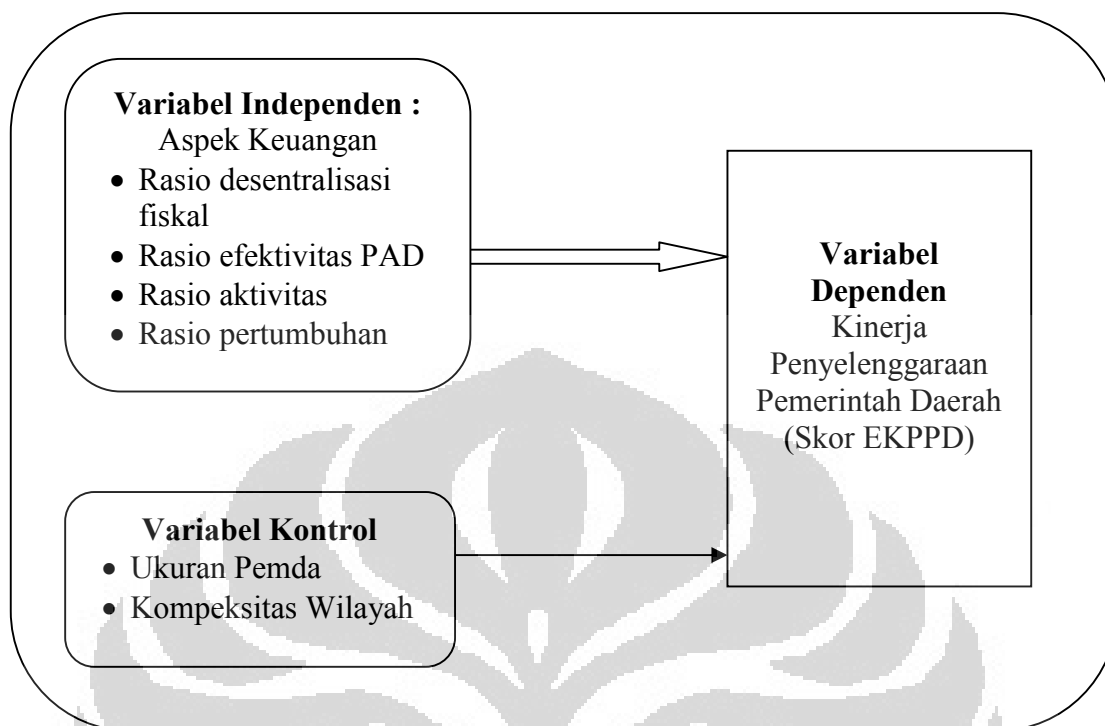
Seiring dengan adanya otonomi daerah maka tanggung jawab yang diterima oleh Pemda menjadi semakin besar karena Pemda harus mengelola sumber daya yang ada pada daerahnya dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan secara lebih efektif dan efisien. Selain mengelola sumber daya secara baik, keuangan daerah juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat UU otonomi daerah. Pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara/masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas keuangan tersebut adalah dalam bentuk pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain LKPD Pemda juga diwajibkan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dari laporan-laporan yang dibuat oleh Pemda, Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi atas kinerja Pemda. Salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat adalah dalam bentuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Dalam melakukan EKPPD salah satu faktor yang dinilai adalah faktor keuangan. Faktor-faktor keuangan tersebut diantaranya adalah rasio – rasio yang bersumber dari APBD.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang diproksikan dengan rasio-rasio keuangan yang bersumber dari APBD berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 2 (dua) variabel kontrol yaitu ukuran Pemda dan kompleksitas wilayah. Gambar 3.1 menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel independen, dan variabel kontrol dalam mempengaruhi variabel dependen.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Olah Data Penulis

3.2 Hipotesis Penelitian

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Secara umum, bila kontribusi PAD dalam Total Pendapatan Daerah (TPD) semakin besar maka tingkat kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan/program/pengeluarannya sendiri semakin besar. Dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat sehingga pada akhirnya kinerja Pemda tersebut juga meningkat.

Hal ini didukung oleh Mustikarini (2012) yang membuktikan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah :

H₁: Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Rasio Efektivitas PAD

Kemampuan suatu daerah untuk merealisasikan target PAD yang telah dianggarkan berdasarkan potensi riil dari daerah terkait dapat digunakan untuk melihat efektivitas Pemda. Jika suatu Pemda dapat mencapai target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa kinerja Pemda tersebut semakin baik. Semakin besar realisasi PAD yang diperoleh maka semakin efektif kinerja Pemda tersebut. Pada akhirnya, efektivitas kinerja Pemda tersebut juga akan berpengaruh pada kinerja Pemda secara keseluruhan karena PAD yang berhasil direalisasikan tersebut dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Cahya (2010) meneliti pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan memiliki korelasi yang kuat dan searah dengan kinerja.

Dari penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Rasio Aktivitas

Belanja pembangunan/modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja pembangunan biasanya digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa fisik maupun jasa, agar masyarakat yang daerahnya di kelola/di bawah naungan Pemda terkait lebih sejahtera, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan di daerahnya. Oleh karena itu semakin tinggi belanja pembangunan seharusnya semakin tinggi pelayanan kepada masyarakat. Merujuk pada hal itu, seharusnya semakin tinggi pelayanan, maka semakin tinggi kinerja penyelenggaraan Pemda.

Rustiono (2008) melakukan penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kinerja ekonomi makro di Propinsi Jawa Tengah. Dari penelitian tersebut disimpulkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Jawa Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃: Rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Rasio Pertumbuhan

PAD menunjukkan kemampuan daerah memperoleh pendapatan dari sumber-sumber asli daerah untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu pemerintah daerah.

Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah :

H₄: Rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.3 Model Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual sebelumnya, maka model penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{SKOR}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{DF}_i + \beta_2 \text{EFEKTIF}_i + \beta_3 \text{AKTIF}_i + \beta_4 \text{TUMBUH}_i + \beta_5 \text{TA}_i + \beta_6 \text{KOMPLEK}_i + \varepsilon_i \quad (3.1)$$

Keterangan :

SKOR	= Skor Kinerja
DF	= Rasio Desentralisasi Fiskal
EFEKTIF	= Rasio Efektivitas PAD
AKTIF	= Rasio Aktivitas
TUMBUH	= Rasio Pertumbuhan
TA	= Ukuran Pemda
KOMPLEK	= Kompleksitas Wilayah
ε	= Error

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD Tahun 2008 – 2010 Tingkat Nasional dengan *range* nilai 0-4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian portfolio secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2008 - 2010 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah.

3.4.2 Variabel Independen

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini merupakan hasil bagi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).

PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah serta lain – lain pendapatan yang sah. TPD merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran.

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad (3.2)$$

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD memperlihatkan seberapa besar pemerintah daerah mampu merealisasikan target PAD dari target yang telah dianggarkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar rasio ini maka semakin efektif pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD daerahnya.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \quad (3.3)$$

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggunakan rasio belanja pembangunan terhadap APBD. Angka yang digunakan sebagai belanja pembangunan adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rasio ini menunjukkan seberapa besar alokasi belanja untuk pembangunan (modal) terhadap total belanjanya. Bila semakin besar alokasi untuk belanja modal berarti semakin besar dana yang tersedia untuk pembangunan.

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \quad (3.4)$$

4. Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan PAD dapat dilihat sebagai kenaikan/ penurunan kemampuan daerah membiayai sendiri pengeluaran daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{X_{n-1}}} \quad (3.5)$$

3.4.3 Variabel Kontrol

1. Ukuran Pemda

Dalam penelitian ini dipertimbangkan ukuran kabupaten/kota sebagai salah satu penentu kinerja pemda. Pemda yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan kinerjanya. Beberapa penelitian terdahulu mengenai ukuran pemda dilakukan oleh Sumarjo (2010) dan Mustikarini (2012) yang membuktikan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya.

$$\text{Ukuran Pemda} = \ln(\text{Total Aset}) \quad (3.6)$$

2. Kompleksitas Wilayah

Variabel lain yang dipertimbangkan sebagai penentu kinerja pemda adalah kompleksitas wilayah. Kota memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten karena kota mempunyai infrastruktur dan stabilitas ekonomi yang lebih baik sehingga mempunyai sumber daya manusia yang lebih berkompeten. Hal ini membuat pemerintah kota akan lebih baik kinerjanya, karena memiliki infrastruktur, ekonomi, maupun sumber daya manusia yang lebih berkompeten karena telah memanfaatkan fasilitas/infrastruktur yang ada pada kota.

Medina (2012) meneliti pengaruh kompleksitas wilayah terhadap publikasi IKD dalam situs resmi pemerintahan, dimana hasilnya tipe pemerintahan kota yang penduduknya lebih bervariasi dan beragam memiliki IKD yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* dengan kota diberi kode 1 dan kabupaten diberi kode 0.

Kota	= 1	(3.7)
Kabupaten	= 0	

Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian

Variabel	Parameter	Arah
Kinerja Pemda (SKOR)	Skor EKPPD	
Rasio Desentralisasi Fiskal (DF)	$(PAD / \text{Total Penerimaan Daerah}) \times 100\%$	+
Rasio Efektivitas PAD (EFEKTIF)	Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah	+
Rasio Aktivitas (AKTIF)	Total Belanja Pembangunan / APBD	+
Rasio Pertumbuhan (TUMBUH)	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{X_n - (X_n - 1)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{X_n - 1}}$	+
Ukuran Pemda (TA)	$\ln(\text{Total Aset Pemda})$	+
Kompleksitas Pemda (KOMPLEK)	Kota = 1 Kabupaten = 0	+

Sumber : Olah Data Penulis

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 – 2010. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten/kota yang mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2008 – 2010.
2. Laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (tahun 2008 – 2010).
3. Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki skor kinerja dari tahun 2008 - 2010.

Berdasarkan ketentuan di atas maka jumlah data yang digunakan adalah berjumlah 800 Pemda dengan rincian pengambilan sampel seperti dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel

Proses Pengambilan Sampel	Jumlah Pemda			Total
	2010	2009	2008	
Jumlah seluruh Pemda	483	473	452	1408
Pemda yang memiliki opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 2008 – 2010	(141)	(154)	(139)	(434)
Pemda yang datanya tidak lengkap	(90)	(27)	(26)	(143)
Pemda dengan data lengkap	252	292	287	831
Data Outlier	(4)	(8)	(19)	(31)
Jumlah sampel akhir dalam Penelitian	248	284	268	800

Sumber : Olah Data Penulis

3.6 Jenis dan Sumber Data

Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari :

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2011 untuk melihat opini audit atas LKPD kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 - 2010.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008 – 2010.
3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 – 2010.

3.7 Metode Pengolahan Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Pada statistik deskriptif, penulis melakukan teknik statistik yang berhubungan dengan penyajian data statistik dalam bentuk gambaran angka-angka. Teknik umum yang digunakan dalam analisis deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, dan rata-rata.

3.7.2 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal. Pengujian tentang normal atau tidaknya data dilakukan dengan normal P – Plot. Jika titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Nachrowi dan Usman, 2006).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian regresi ini, peneliti melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Uji Heterokedastisitas (*Heterocedasticity*)

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Gangguan heterokedastisitas sering muncul dalam data *cross section*, tetapi juga bisa terjadi pada data *time series*. Jika terdapat heteroskedastisitas dalam model, maka varians tidak sama atau *error* tidak konsisten. *Error* yang diharapkan adalah variasinya seragam sehingga *error*nya konsisten.

Pada program E-views cara mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *White Heteroskedasity Test*. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas

H_1 : Ada heteroskedastisitas

Apabila nilai probabilitas dari $Obs * R^2$ lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa model regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai $Obs * R^2$ lebih besar dari tingkat $\alpha = 5\%$, maka H_0 tidak ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi adalah bersifat homokedastis. Program E-views menyediakan metode koreksi untuk koefisien dalam model. Untuk menghilangkan adanya heteroskedastisitas maka pada pengujian peneliti menambahkan metode koreksi koefisien *white cross-section* sehingga koreksi dapat secara otomatis.

2. Uji Multikolinieritas (*Multicollinearity*)

Multikolinieritas adalah gejala adanya hubungan linear yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independen yang ada di dalam model regresi. Dalam praktiknya, umumnya multikolinieritas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel independen yang secara matematis tidak berkorelasi (korelasi=0). Akan tetapi, ada multikolinieritas yang signifikan dan tidak signifikan (mendekati nol). Model penelitian yang baik memiliki multikolinieritas yang rendah sebab jika multikolinieritas tinggi maka model tidak bisa memisahkan efek parsial dari satu variabel independen terhadap variabel independen lainnya. Untuk melihat adanya multikolinieritas dengan melihat *correlation matrix* pada program Eviews, dimana korelasi antar variabel independen kurang dari 0.8 (*rule of thumbs 0.8*) maka dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas.

Cara lain untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak dengan menggunakan program SPSS, yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya.

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0.05 atau sama dengan nilai $VIF > 5$. (Trihendradi, 2009).

3. Autokorelasi

Autokorelasi menggambarkan adanya korelasi antara varians eror suatu observasi dengan observasi lainnya. Hal ini dapat muncul ketika terdapat hubungan yang signifikan antara 2 (dua) data yang berdekatan. Biasanya gangguan ini muncul pada data *time series*. Gejala autokorelasi ini dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, jika nilai statistik DW berada diantara 1,54 hingga 2,46, maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi.

3.7.3 Uji Model Regresi

1. Uji F-statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan atau tidak. Signifikansi dari uji F dapat dilihat dari F-statistik. Jika F-statistik lebih besar F-tabel, maka persamaan regresi tersebut signifikan. Suatu model dianggap signifikan jika nilai probabilitas *Prob.(F-Statistic)* lebih kecil dari 5%, karena itu nilainya semakin baik jika semakin rendah.

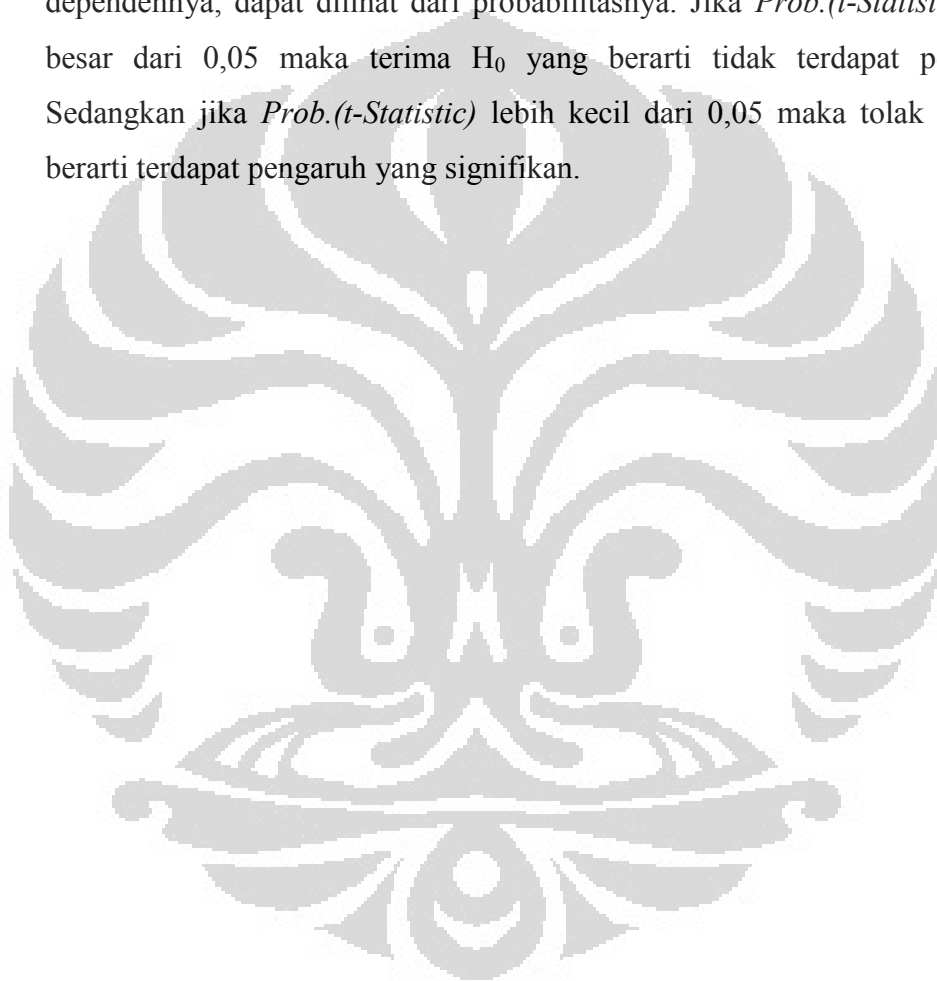
2. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Pengujian koefisien determinasi menggunakan R^2 dan *Adjusted R²* sebagai parameternya. Nilai R^2 dan *Adjusted R²* menunjukkan tingkat keberhasilan variabel – variabel independen di dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai R^2 dan *Adjusted R²* berada dalam kisaran nol hingga satu. Semakin tinggi nilai R^2 dan *Adjusted R²*, maka model regresi yang digunakan semakin baik menjelaskan keberadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan *Adjusted R²*

untuk mengukur koefisien determinasi dikarenakan nilainya lebih tepat (Nachrowi dan Usman, 2006).

3. Uji T-statistik

Uji T-statistik ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui apakah koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya, dapat dilihat dari probabilitasnya. Jika *Prob.(t-Statistic)* lebih besar dari 0,05 maka terima H_0 yang berarti tidak terdapat pengaruh. Sedangkan jika *Prob.(t-Statistic)* lebih kecil dari 0,05 maka tolak H_0 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan.



BAB 4

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Statistik Deskriptif Sampel

Tabel 4.1 merupakan deskripsi statistik dari variabel dependen, independen dan kontrol 800 sampel penelitian ini, yaitu skor EKPPD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan PAD, ukuran Pemda, dan kompleksitas wilayah.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

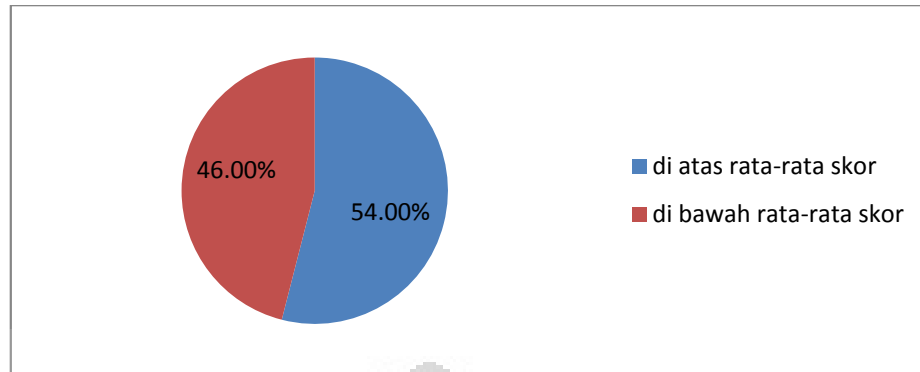
N = 800	Mean	Maximum	Minimum	Std. Deviasi
SKOR	2.448	3.240	1.240	0.329
DF	0.072	0.687	0.008	0.059
EFEKTIF	1.011	2.835	0.031	0.267
AKTIF	0.233	0.618	0.045	0.106
TUMBUH	0.272	72.250	-0.723	2.662
TA (triliun)	1.929	32.622	0.312	0.607
KOMPLEK	0.219	1.000	0.000	0.414

Sumber : Olah Data Eviews

4.1.1 Variabel Dependen

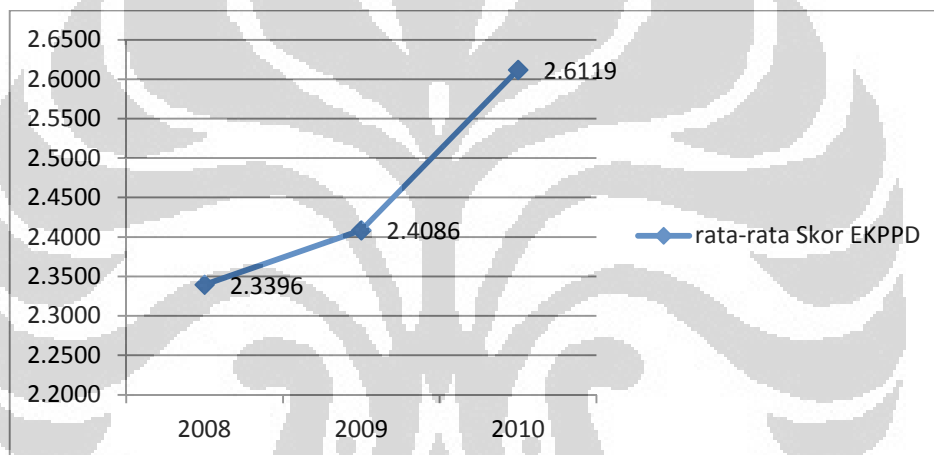
Nilai rata-rata skor kinerja sebesar 2.448 berarti secara rata-rata skor kinerja Pemda selama 2008 – 2010 dapat dikatakan baik karena berada pada kriteria prestasi tinggi. Pemda yang memiliki skor kinerja tertinggi pada penelitian ini adalah kota Yogyakarta (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) untuk tahun 2010. Dari Gambar 4.1 dapat di lihat bahwa Pemda yang memiliki skor kinerja Pemda di atas rata-rata sebesar 54% (432 Pemda), berarti selama tahun 2008 sampai tahun 2010 sudah banyak Pemda yang memiliki skor kinerja yang tinggi.

Gambar 4.1 Skor Kinerja Pemda



Sumber : Olah Data Penulis

Gambar 4.2 Rata-Rata Skor EKPPD Tahun 2008 - 2010



Sumber : Olah Data Penulis

Berdasarkan Gambar 4.2, tren rata-rata skor kinerja Pemda kabupaten/kota dari tahun 2008 – 2010 masih berada pada kriteria prestasi tinggi walupun telah terjadi kenaikan rata-rata skor kinerja Pemda dari tahun 2008 – 2010. Pada tahun 2008 rata-rata skor kinerja berada pada nilai 2.3396 sedangkan pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 2.94% menjadi 2.4086 dan pada tahun 2010 rata-rata skor kinerja mengalami kenaikan kembali sebesar 8.44% menjadi 2.6119.

4.1.2 Variabel Independen

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Dari 800 Pemda kabupaten/kota selama 2008 – 2010 terlihat bahwa nilai dari rasio ini cukup lebar yaitu dari 0.008 sampai dengan 0.687. Daerah yang

mempunyai rasio paling kecil adalah Kabupaten Pramubulih (Provinsi Sumatera Selatan) tahun 2009 sedangkan yang paling tinggi adalah Kabupaten Badung (Provinsi Bali) tahun 2009.

Apabila dilihat dari nilai rata-rata rasio desentralisasi fiskal yang 7.27%. hal ini berarti secara rata-rata kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat masih sangat rendah.

2. Rasio Efektivitas PAD

Nilai rata-rata dari rasio ini adalah 1.011 yang berarti kemampuan daerah dalam merealisasikan apa yang telah dianggarkannya sudah cukup baik karena sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan Kabupaten Fak-fak (Provinsi Papua Barat) memiliki nilai tertinggi dari rasio ini pada tahun 2008.

3. Rasio Aktivitas

Nilai rata-rata dari rasio ini adalah 0.233 yang berarti alokasi belanja Pemda untuk belanja pembangunan baru 23.3% dari total belanja Pemda selama 2008 – 2010. Dengan kata lain masih banyaknya Pemda yang mengalokasikan sebagian besar belanjanya pada kegiatan operasional dibandingkan untuk pembangunan daerah. Namun Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Nusa Tenggara Timur) memiliki rasio yang terbesar yaitu 61.8% yang berarti Kabupaten ini sudah mengalokasikan belanjanya sebagian besar pada pembangunan Kabupatennya.

4. Rasio Pertumbuhan PAD

Dari 800 sampel Pemda kabupaten/kota terlihat bahwa range nilai dari rasio ini sangat lebar. Ada kabupaten yang mengalami penurunan PAD seperti Kabupaten Natuna (Provinsi Bangka Belitung) tahun 2008 . Nilai rata-rata dari rasio ini adalah 0.272 yang berarti secara rata-rata kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan PAD sudah cukup baik selama tahun 2008 - 2010.

4.1.3 Variabel Kontrol

1. Ukuran Pemda

Dari 800 sampel Pemda kabupaten/kota terlihat bahwa range dari ukuran Pemda sangat lebar. Daerah yang mempunyai jumlah aset terbesar adalah Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) tahun 2010 dan yang terkecil adalah kabupaten Mamasa (Provinsi Sulawesi Barat) tahun 2008. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan terjadi ketimpangan aset yang dimiliki antara Pemda yang satu dengan Pemda yang lain.

2. Kompleksitas Wilayah

Dari 800 sampel penelitian Pemda yang berbentuk kota berjumlah 175 sedangkan yang berbentuk kabupaten berjumlah 625.

4.2 Uji Beda Rata-Rata

Selanjutnya, penulis melakukan uji beda rata-rata skor kinerja setiap variabel independen untuk mengetahui indikasi awal hubungan variabel independen dan variabel kontrol dengan skor kinerja. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengelompokkan sampel tersebut menjadi dua kelompok (Rendah/Tinggi). Apabila nilai sampel di atas rata-rata, maka sampel tersebut masuk pada kelompok tinggi namun apabila nilai sampel di bawah rata-rata, maka termasuk pada kelompok rendah. Selanjutnya, dilakukan uji beda rata-rata skor kinerja antara kelompok sampel tinggi dengan kelompok sampel rendah untuk setiap variabel independen dan variabel kontrol

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa semua variabel berbeda signifikan, menunjukkan indikasi hubungan yang positif atau searah kecuali untuk variabel AKTIF dan TUMBUH yang mempunyai arah berlawanan. Jadi artinya, kelompok Pemda dengan rasio desentralisasi fiskal (DF) dan rasio efektivitas PAD (EFEKTIF) yang tinggi akan memiliki skor kinerja yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Pemda dengan DF dan EFEKTIF yang rendah. Sedangkan untuk variabel rasio aktivitas (AKTIF) dan rasio pertumbuhan (TUMBUH) yang rendah akan memiliki skor kinerja yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Pemda dengan AKTIF dan TUMBUH yang tinggi. Untuk variabel kontrol, dapat dilihat hubungan yang positif atau searah dengan skor kinerja. Artinya, semakin besar ukuran Pemda (TA) dan Pemda kota

(KOMPLEK) maka kinerja dari Pemda akan semakin tinggi dibandingkan dengan PEMDA yang memiliki TA kecil dan Pemda kabupaten akan memiliki skor kinerja yang lebih rendah.

Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Rata-Rata

Variabel Bebas	Skor Kinerja		Sig. T-Test
	Rendah/Kecil	Tinggi/Besar	
DF	2.3619	2.5916	0.0000 *
EFEKTIF	2.4196	2.4716	0.0270 **
AKTIF	2.5331	2.3389	0.0000 *
TUMBUH	2.4685	2.3643	0.0000 *
TA	2.3907	2.5149	0.0000 *
	Kabupaten	Kota	
KOMPLEK	2.4231	2.5398	0.0000 *

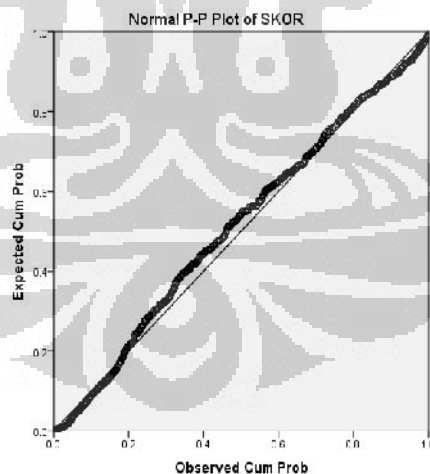
Sumber : Olah Data SPSS

*Signifikan pada $\alpha = 1\%$

**Signifikan pada $\alpha = 5\%$

4.3 Uji Normalitas

Gambar 4.3 Normalitas



Sumber : Olah Data SPSS

Uji normalitas dilakukan dengan melihat Normal Probability Plot. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data Residual terdistribusi secara normal dimana titik – titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih mengikuti garis diagonal.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian adanya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *White* (*White Heteroskedasticity Test*). Pengujian dilakukan terhadap model dengan $\alpha = 5\%$. Bila *P-Value* $< \alpha$, maka terdapat indikasi gejala heteroskedastisitas. Pada model penelitian, dengan tingkat keyakinan 95% tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas karena *P-Value*: 0.143713 $> 0,05$. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.3 Uji Heteroskedaksitas
White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.306001	Probability	0.141595
Obs*R-squared	33.66332	Probability	0.143713

Sumber : Olah Data Eviews

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 merupakan matriks korelasi yang dapat digunakan untuk melihat indikasi multikolinearitas. Adanya indikasi multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai korelasi yang lebih besar dari 0.8. Berdasarkan Tabel 4.4, tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang nilainya lebihdari 0.8. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model penelitian.

Tabel 4.4 Matriks Korelasi

	DF	EFEKTIF	AKTIF	TUMBUH	TA	KOMPLEK
DF	1.00000					
EFEKTIF	0.18778	1.00000				
AKTIF	-0.18735	0.12129	1.00000			
TUMBUH	-0.02664	-0.01565	0.03669	1.00000		
TA	0.40297	0.05726	-0.19617	-0.09395	1.00000	
KOMPLEK	0.29396	0.07471	-0.05303	-0.01850	0.06617	1.00000

Sumber : Olah Data Eviews

Selain itu, untuk mengetahui adanya multikorelasi dapat dilakukan dengan menguji VIF dan Tolerance dengan menggunakan SPSS 20. Berdasarkan teori, jika nilai VIF mendekati 1 berarti tidak terdapat multikolinieritas, tapi jika nilainya $VIF > 5$ maka ada multikolinieritas. Sedangkan untuk *Tolerance* dikatakan tidak mempunyai korelasi jika nilainya mendekati 1, jika memiliki nilai 0 maka mempunyai korelasi sempurna.

Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
DF	0.729	1.371
EFEKTIF	0.939	1.065
AKTIF	0.922	1.084
TUMBUH	0.990	1.010
TA	0.813	1.230
KOMPLEK	0.910	1.099

Sumber : Olah Data SPSS

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat angka *Tolerance* dan angka VIF mendekati 1. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model penelitian.

4.4.3 Uji Autokorelasi

Pengujian untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson stat setelah model diregresikan. Apabila nilai Durbin-Watson stat mendekati nilai 2 pada rentang 1.54 sampai 2.46, maka model dinyatakan tidak mengalami masalah autokorelasi. Nilai probabilitas Durbin-Watson stat untuk pengujian ini adalah 1.55. Dengan demikian berarti tidak ada masalah autokorelasi dalam model penelitian ini. Selain itu penelitian ini adalah *cross section* berarti tidak terpengaruh dengan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian.

4.5 Uji Model Regresi

Tabel 4.6 memuat ringkasan hasil pengujian model penelitian. Dari Tabel 4.6 tersebut dapat dilihat nilai koefisien, nilai t-statistik, dan probabilitasnya untuk setiap variabel independen dan variabel kontrol. Terdapat juga nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*), F statistik dan probabilitasnya untuk melihat model secara keseluruhan.

Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Uji Regresi

Variabel	Hipotesis	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C		0.0710	0.1325	0.8947
DF	+	0.4668	2.2366	0.0256 **
EFEKTIF	+	0.0218	0.5391	0.5900
AKTIF	+	-0.9581	-9.3062	0.0000 *
TUMB	+	-0.0104	-2.6398	0.0085 *
TA	+	0.0902	4.7193	0.0000 *
KOMPLEK	+	0.0732	2.7608	0.0059 *
Adjusted R²			0.194357	
F-statistic			33.12576	
Prob(F-statistik)			0.000000	

Sumber : Olah Data Eviews

*Signifikan pada $\alpha = 1\%$

**Signifikan pada $\alpha = 5\%$

4.5.1 Uji Signifikansi *F-test*

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai *Prob(F-statistic)* dengan nilai α . Jika nilai *Prob(F-statistic)* lebih kecil dari α berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. *Prob(F-statistic)* pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$. Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan PAD, ukuran Pemda dan kompleksitas wilayah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota tahun 2008 - 2010.

4.5.2 Uji Determinasi R^2 (*Adjusted R²*)

Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen. Nilai *Adjusted R²* pada Tabel 4.6 sebesar 19.43%. Hal ini berarti 19.43% variasi skor kinerja Pemda kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, ukuran Pemda, dan kompleksitas wilayah. Dengan demikian, 80.57% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.5.3 Uji Signifikansi *T-test*

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah secara individual variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Tabel 4.6 memaparkan hasil regresi linear berganda terhadap model untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4 dalam penelitian.

4.5.3.1 Variabel Independen

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, nilai *P value* yang dimiliki adalah 0.0256. Hal ini berarti rasio desentralisasi fiskal yang diukur dengan PAD dibagi dengan total pendapatan berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 95%. Nilai koefisien untuk variabel rasio desentralisasi fiskal menunjukkan tanda **positif** yang artinya menunjukkan hubungan yang searah antara rasio desentralisasi fiskal (variabel independen) dengan skor kinerja Pemda kabupaten/kota (variabel dependen). Dengan demikian hipotesis 1 penelitian ini diterima. Semakin besar rasio desentralisasi fiskal maka semakin tinggi skor kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Lin *et. al.* (2010) dan Mustikarini (2012).

2. Rasio Efektivitas PAD

Hipotesis 2 ditolak. Berdasarkan data pada Tabel 4.6 nilai *P value* yang dimiliki adalah 0.5900. Hal ini berarti rasio efektivitas PAD yang diukur

dengan nilai PAD dibagi anggaran PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 90%. Nilai koefisien untuk variabel rasio efektivitas PAD menunjukkan nilai 0.02182. Tanda **positif** menunjukkan hubungan yang searah antara rasio efektivitas PAD (variabel independen) dengan skor kinerja Pemda kabupaten/kota (variabel dependen).

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Cahya (2010). Hal ini kemungkinan terjadi karena Pemda kabupaten/kota kurang terampil dalam mengontrol dan mengelola potensi yang ada pada daerahnya. Ketidakkampuan dalam pengelolaan PAD ini membuat rasio efektivitas PAD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Pemda.

3. Rasio Aktivitas

Hipotesis 3 ditolak. Berdasarkan data pada Tabel 4.6, nilai *P value* yang dimiliki adalah 0.0000. Hal ini berarti rasio aktivitas yang diukur melalui belanja modal berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Namun berbeda dengan rasio desentralisasi fiskal, nilai koefisien untuk variabel rasio aktivitas menunjukkan tanda **negatif** yang berarti menunjukkan hubungan yang berlawanan antara rasio aktivitas (variabel independen) dengan skor kinerja Pemda kabupaten/kota (variabel dependen). Berarti semakin besar rasio aktivitas maka akan semakin turun kinerja Pemda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purba (2006) dan Mustikarini (2012) Hal ini dikarenakan kebijakan alokasi belanja belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pemda terkait.

Arah negatif pada rasio aktivitas terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda kemungkinan terjadi karena semakin besar belanja pembangunan untuk infrastruktur maupun pelayanan kepada masyarakat maka semakin sulit melakukan pengawasan terhadap Pemda terkait, minimnya pengawasan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atas pengalokasian dan penggunaan belanja pembangunan. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pada Pemda.

4. Rasio Pertumbuhan PAD

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, nilai *P value* yang dimiliki adalah 0.0085. Hal ini berarti rasio pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Namun nilai koefisien untuk variabel rasio pertumbuhan PAD menunjukkan tanda **negatif** yang berarti menunjukkan hubungan yang berlawanan antara rasio pertumbuhan PAD (variabel independen) dengan skor kinerja Pemda kabupaten/kota (variabel dependen). Dengan demikian, hipotesis 4 ditolak. Semakin kecil rasio ini ternyata membuat kinerja Pemda akan semakin baik. Dengan kata lain, peningkatan pertumbuhan PAD tidak sejalan dengan peningkatan kinerja Pemda. Hal ini kemungkinan karena Pemda semata-mata hanya berusaha untuk menaikkan PAD tanpa memperhatikan perbaikan kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda belum mampu mengelola dengan baik pendapatannya sehingga kerjanya bertolak belakang dengan peningkatan pertumbuhan PAD.

4.5.3.2 Variabel Kontrol

1. Ukuran Pemda

Ukuran Pemda yang diukur dengan Ln total aset memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Berdasarkan data pada Tabel 4.6, nilai *P value* yang dimiliki adalah 0.0000. Hal ini berarti ukuran Pemda berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemda pada tingkat keyakinan 99%.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumarjo (2010) serta Mustikarini (2012).

2. Kompleksitas Wilayah

Pada Tabel 4.6 nilai *P value* yang dimiliki adalah 0.0059. Hal ini berarti variabel kompleksitas wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Pemda pada tingkat keyakinan 99%. Nilai koefisien untuk variabel kompleksitas wilayah menunjukkan tanda **positif** yang artinya Pemda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Medina (2012) dimana tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih bervariasi dan

beragam memiliki IKD yang dipublikasikan dalam situs resmi pemerintah daerah lebih baik dibandingkan dengan kabupaten.

4.6 Analisis Tambahan

Penulis mencoba melakukan kembali regresi dengan mengganti proksi rasio aktivitas yang semula menggunakan rasio belanja pembangunan terhadap APBD menjadi rasio belanja langsung terhadap total APBD sesuai dengan yang ada di IKK Pemda. Sampel yang digunakan hanya sebanyak 260 sampel karena banyak Pemda yang tidak mempublikasikan belanja langsung pada laporan keuangannya. Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Regresi (Belanja Langsung)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	-2.0001	-2.1150	0.0354
DF	-0.0676	-0.2366	0.8131
EFEKTIF	-0.0155	-0.1949	0.8456
AKTIF	-0.5263	-4.5472	0.0000 *
TUMBUH	-0.0602	-1.0280	0.3049
TA	0.1666	4.9969	0.0000 *
KOMPLEK	0.1277	2.6124	0.0095 *
Adjusted R²	0.1638		
F-statistic	9.7500		
Prob(F-statistik)	0.0000		

Sumber : Olah Data Eviews

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rasio aktivitas yang diukur dengan belanja langsung terhadap total APBD tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor kinerja Pemda. Bahkan nilai koefisien untuk variabel rasio aktivitas juga menunjukkan tanda negatif, sama halnya dengan menggunakan belanja pembangunan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan berbagai pengujian dan analisis dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Semakin besar rasio desentralisasi maka akan membuat skor kinerja Pemda yang semakin besar.
2. Rasio efektifitas PAD tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.
3. Rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Semakin besar rasio aktivitas maka akan membuat skor kinerja Pemda yang semakin kecil.
4. Rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Semakin besar rasio pertumbuhan maka akan membuat skor kinerja Pemda yang semakin kecil.
5. Untuk variabel kontrol, ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Semakin besar ukuran Pemda maka akan membuat skor kinerja Pemda yang semakin besar. Sedangkan kompleksitas wilayah berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Dimana Pemda yang berbentuk kota akan memiliki skor kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan Pemda yang berbentuk kabupaten.

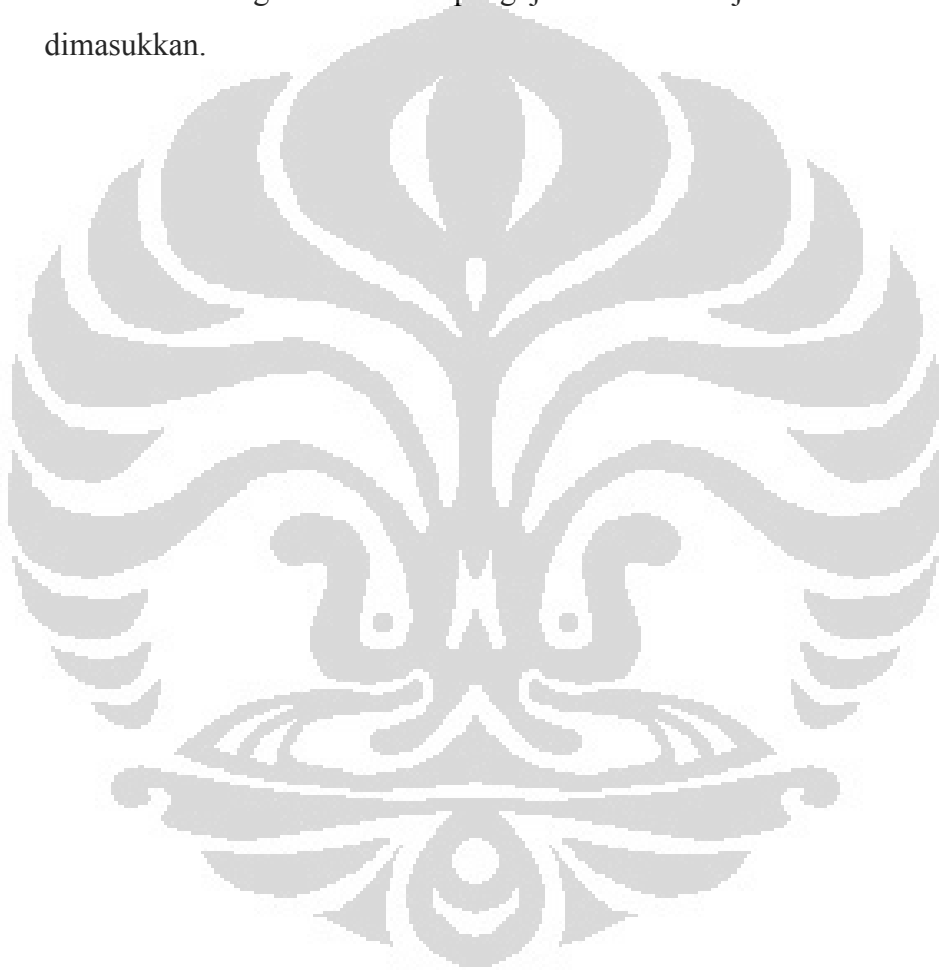
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebesar 19.44% bisa menerangkan atau menjelaskan variabel dependen. Hal ini berarti 19.44% variasi skor kinerja Pemda kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan yang di proksikan dengan rasio desentralisasi fiskal, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, ukuran Pemda dan kompleksitas wilayah.

Dengan demikian, 80,56% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Pada penelitian selanjutnya dapat dimasukkan faktor-faktor lain yang belum diuji pada penelitian ini seperti dari sisi kinerja non keuangannya maupun kinerja keuangan lain yang belum diuji pada penelitian ini.

2. Dalam penelitian ini menggunakan *cross section*, pada penelitian selanjutnya dapat mengubah jenis data dari *cross section* menjadi jenis data panel untuk melihat kemungkinan hasil pengujian berbeda jika unsur *time-series* dimasukkan.



DAFTAR REFERENSI

- Ardhini. (2011). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Adi, Priyo Hari. (2006). *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2011*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 10 mei 2012.
- Cahaya, Anggi Meliantha. (2010). *Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya*. Skripsi. Bandung: UNIKOM.
- Coll, Maria Teresa Balaguer., Prior, Diego., Ausina, Emili Tortosa. (2006). On the determinants of local government performance : A two-stage nonparametric approach. *European Economic Review (2007)* , 425-451.
- Dalimunthe, Tigor Mulia. (2010). *Review Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008*. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dhuanovawati, Morgan. (2010). *Analisi atas Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2008*. Skripsi. Depok : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Febriana, Annisa. (2010). *Analisis Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2008*. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Florida, Asha. (2006). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- . (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husna, Lutfia Hidayatul. (2011). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2005-2009 Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar*. Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2008-2010 Tingkat Nasional*.
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., & Ho, Tsai-Neng. (2010). Applying Integrated DEA/AHP to Evaluate The Economic Performance of Local Government in China. *European Journal of Operational Research* 209 , 129-140.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- . (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 1* , Hal 1-17.

- Medina, Febri. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mustikarini, Widya Astuti. (2012). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nachrowi, Nachrowi D & Usman, Hardius. (2006). *Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan*. Depok : Lembaga Penerbit FEUI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Purba, Adearman. (2006). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Rustiono, Deddy. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara

Rusydi, Bahrul Ulum. (2010). *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal Studi Kasus Provinsi Di Indonesia Tahun 2005 - 2008*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Sasana, Hadi. (2006). *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. *Dinamika Pembangunan*, 145-170.

Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Suprpto, Tri. (2007). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Trihendradi, Cornelius. (2008). *Step By Step SPSS Analisis Data Statistik*. Yogyakarta : Andi Offset.

Ulum, Ihyaul. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen I, II, III dan IV

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

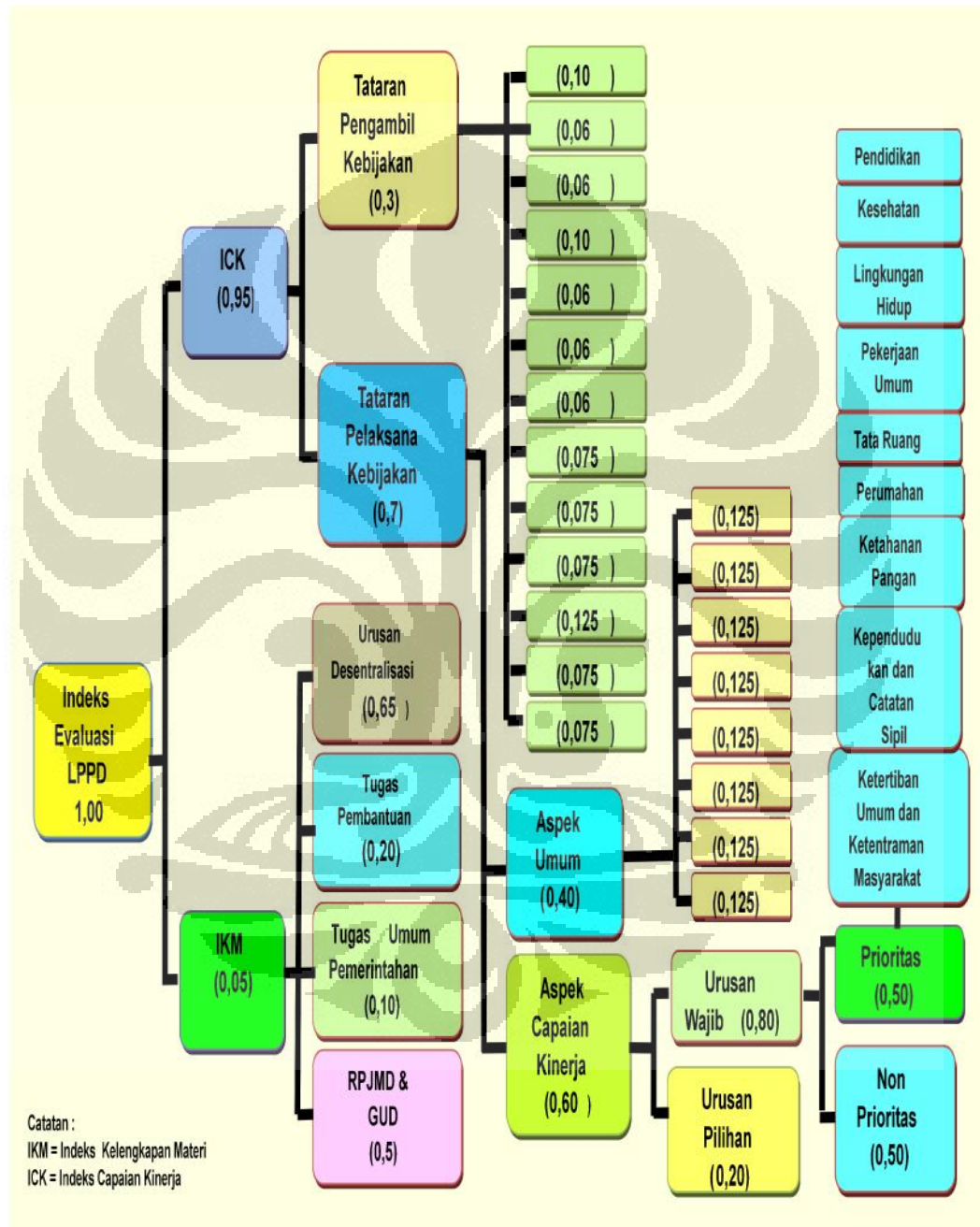
Universitas Indonesia. (2008). *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*. Depok

Vitawati, Mey. (2008). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Widodo. (2001). *Analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Malang.

Winarno, Wing W. (2009). *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bagan Bobot dan Komponen EKPPD Berdasarkan LPPD dan/atau Seplemen LPPD



Sumber : Sosialisasi Manual EKPPD Tahun Anggaran 2008

Daftar Nama Pemda

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
	Propinsi Aceh				
1	Kab Aceh Barat	v	v		2
2	Kab Aceh Barat Daya	v	v		2
3	Kab Aceh Besar		v	v	2
4	Kab Aceh Selatan			v	1
5	Kab Aceh Jaya		v		1
6	Kab Aceh Singkil		v	v	2
7	Kab Aceh Tamiang	v	v	v	3
8	Kab Aceh Tengah	v	v	v	3
9	Kab Aceh Tenggara	v	v		2
10	Kab Aceh Timur	v	v		2
11	Kab Aceh Utara	v			1
12	Kab Bener Meriah	v	v		2
13	Kab Gayo Lues	v	v	v	3
14	Kab Nagan Raya				0
15	Kab Pidie	v	v		2
16	Kab Simeulue	v			1
17	Kota Banda Aceh	v	v	v	3
18	Kota Langsa		v		1
19	Kota Lhokseumawe	v	v		2
20	Kota Sabang	v	v	v	3
	Propinsi Sumatera Utara				
21	Kab Asahan	v	v		2
22	Kab Dairi	v	v	v	3
23	Kab Humbang Hasundutan	v	v	v	3
24	Kab Karo	v	v	v	3
25	Kab. Labuhanbatu			v	1
26	Kab. Mandailing Natel			v	1
27	Kab Pakpak Bharat	v	v	v	3
28	Kab Samosir	v	v	v	3
29	Kab. Serdang Berdagai	v	v	v	3
30	Kab Simalungun	v	v	v	3
31	Kab Tapanuli Tengah	v	v		2
32	Kab. Tapanuli Utara		v	v	2
33	Kab Toba Samosir		v		1
34	Kota Medan			v	1
35	Kota Padangsidimpuan		v	v	2

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
36	Kota Binjai	v			1
37	Kota Pematang Siantar			v	1
38	Kota Sibolga	v	v		2
39	Kota Tanjung Balai	v	v	v	3
40	Kota Tebing Tinggi	v	v	v	3
	Propinsi Sumatera Barat				
41	Kab Agam	v	v	v	3
42	Kab Dharmasraya	v	v		2
43	Kab Kep Mentawai	v			1
44	Kab Lima Puluh Kota	v	v		2
45	Kab Padang Pariaman	v	v	v	3
46	Kab Pasaman	v		v	2
47	Kab Pesisir Selatan	v	v	v	3
48	Kab Sijunjung	v	v	v	3
49	Kab Solok	v	v	v	3
50	Kab Tanah Datar	v			1
51	Kota Bukittinggi	v	v	v	3
52	Kota Padang	v			1
53	Kota Padang Panjang		v	v	2
54	Kota Pariaman	v	v	v	3
55	Kota Payakumbuh	v	v	v	3
56	Kota Sawahlunto	v	v	v	3
57	Kota Solok	v	v		2
	Propinsi Riau				
58	Kab Bengkalis	v	v		2
59	Kab Indragiri Hilir	v	v		2
60	Kab Kampar	v	v	v	3
61	Kab Kuantan Singingi	v	v	v	3
62	Kab Pelalawan	v	v		2
63	Kab Rokan Hilir	v	v		2
64	Kab Rokan Hulu	v	v	v	3
65	Kab Siak	v		v	2
66	Kota Dumai	v	v		2
67	Kota Pekanbaru	v	v	v	3
	Propinsi Jambi				
68	Kab Batang Hari	v	v	v	3
69	Kab Bungo		v	v	2
70	Kab. Kerinci			v	1

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
71	Kab Merangin	v	v		2
72	Kab Muaro Jambi		v		1
73	Kab Sarolangun	v	v	v	3
74	Kab Tanjung Jabung Barat		v	v	2
75	Kab Tanjung Jabung Timur		v		1
76	Kab Tebo	v	v	v	3
77	Kota Jambi	v	v	v	3
	Propinsi Sumatera Selatan				
78	Kab Lahat	v	v	v	3
79	Kab Muara Enim	v	v	v	3
80	Kab Musi Banyuasin	v	v	v	3
81	Kab Musi Rawas	v	v	v	3
82	Kab Ogan Ilir	v	v	v	3
83	Kab Ogan Komering Ilir	v	v	v	3
84	Kab. Ogan Komering Ulu	v		v	2
85	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	v	v		2
86	Kab Ogan Komering Ulu Timur	v	v	v	3
87	Kota Lubuklinggau	v	v	v	3
88	Kota Pagaralam	v	v	v	3
89	Kota Palembang	v	v	v	3
90	Kota Prabumulih	v	v	v	3
	Propinsi Bengkulu				
91	Kab. Bengkulu Selatan		v	v	2
92	Kab Bengkulu Utara	v	v	v	3
93	Kab Kaur	v	v	v	3
94	Kab. Kepahiang			v	1
95	Kab. Lebong			v	1
96	Kab Mukomuko		v	v	2
97	Kab Rejang Lebong		v	v	2
98	Kab Seluma	v	v	v	3
99	Kota Bengkulu	v	v	v	3
	Propinsi Lampung				
100	Kab Lampung Barat	v	v	v	3
101	Kab Lampung Selatan	v	v	v	3
102	Kab. Lampung Tengah			v	1
103	Kab Lampung Utara	v	v		2
104	Kab Tanggamus	v	v		2
105	Kab Tulang Bawang		v	v	2

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
106	Kab Way Kanan	v	v	v	3
107	Kota Bandar Lampung	v	v	v	3
108	Kota Metro	v	v	v	3
	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung				
109	Kab Bangka	v	v	v	3
110	Kab Bangka Barat	v	v	v	3
111	Kab Bangka Selatan	v	v	v	3
112	Kab Bangka Tengah	v	v	v	3
113	Kab Belitung		v	v	2
114	Kab Belitung Timur	v	v	v	3
115	Kota Pangkalpinang		v	v	2
	Propinsi Kepulauan Riau				
116	Kab Bintan		v	v	2
117	Kab Karimun		v	v	2
118	Kab Lingga	v		v	2
119	Kab Natuna	v	v	v	3
120	Kota Batam	v	v		2
121	Kota Tanjungpinang	v	v	v	3
	Propinsi Jawa Barat				
122	Kab Bandung	v	v	v	3
123	Kab Bekasi	v	v	v	3
124	Kab Bogor	v		v	2
125	Kab Ciamis	v	v	v	3
126	Kab. Cianjur	v		v	2
127	Kab Cirebon	v		v	2
128	Kab Garut	v	v	v	3
129	Kab Indramayu	v	v	v	3
130	Kab Karawang	v	v	v	3
131	Kab Kuningan	v	v	v	3
132	Kab Majalengka	v	v	v	3
133	Kab Purwakarta	v	v	v	3
134	Kab Subang		v	v	2
135	Kab Sukabumi	v	v	v	3
136	Kab Sumedang	v	v	v	3
137	Kab Tasikmalaya	v	v	v	3
138	Kota Bandung	v	v	v	3
139	Kota Banjar	v		v	2
140	Kota Bekasi	v		v	2

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
141	Kota Bogor	v	v	v	3
142	Kota Cimahi	v	v	v	3
143	Kota Cirebon	v	v	v	3
144	Kota Depok	v	v	v	3
145	Kota Sukabumi	v	v	v	3
146	Kota Tasikmalaya	v	v	v	3
	Propinsi Jawa Tengah				
147	Kab Banjarnegara	v	v	v	3
148	Kab. Banyumas		v	v	2
149	Kab. Batang	v	v	v	3
150	Kab Blora	v	v	v	3
151	Kab Boyolali	v	v	v	3
152	Kab Brebes		v	v	2
153	Kab Cilacap	v	v	v	3
154	Kab Demak	v	v		2
155	Kab Grobogan	v	v	v	3
156	Kab Jepara	v	v	v	3
157	Kab Karanganyar	v	v	v	3
158	Kab Kebumen	v	v	v	3
159	Kab Kendal	v	v	v	3
160	Kab Klaten	v	v	v	3
161	Kab Kudus	v	v	v	3
162	Kab Magelang	v	v	v	3
163	Kab Pati		v	v	2
164	Kab Pekalongan	v	v	v	3
165	Kab Pemasang	v	v	v	3
166	Kab Purbalingga		v	v	2
167	Kab Purworejo	v	v	v	3
168	Kab Rembang	v	v	v	3
169	Kab Semarang	v	v	v	3
170	Kab Sragen	v	v	v	3
171	Kab Sukoharjo	v	v	v	3
172	Kab. Tegal		v	v	2
173	Kab Temanggung	v	v	v	3
174	Kab Wonogiri	v	v	v	3
175	Kab Wonosobo	v	v	v	3
176	Kota Magelang	v	v	v	3
177	Kota Pekalongan	v	v	v	3

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
178	Kota Salatiga	v	v	v	3
179	Kota Semarang	v	v	v	3
180	Kota Surakarta	v	v	v	3
181	Kota Tegal	v	v	v	3
	Propinsi DIY				
182	Kab Bantul	v	v	v	3
183	Kab Gunungkidul	v	v	v	3
184	Kab Kulon Progo	v	v	v	3
185	Kab Sleman	v	v	v	3
186	Kota Yogyakarta	v	v	v	3
	Propinsi Jawa Timur				
187	Kab Bangkalan	v	v	v	3
188	Kab. Banyuwangi		v	v	2
189	Kab Blitar	v	v	v	3
190	Kab. Bojonegoro		v	v	2
191	Kab Bondowoso	v	v	v	3
192	Kab Gresik	v	v	v	3
193	Kab. Jember		v	v	2
194	Kab Jombang	v	v	v	3
195	Kab Kediri	v	v	v	3
196	Kab Lamongan	v	v	v	3
197	Kab Lumajang	v	v	v	3
198	Kab Madiun	v	v	v	3
199	Kab Magetan		v	v	2
200	Kab Malang	v	v	v	3
201	Kab Mojokerto	v	v	v	3
202	Kab Nganjuk	v	v	v	3
203	Kab Ngawi	v	v	v	3
204	Kab Pacitan	v	v	v	3
205	Kab Pamekasan	v	v	v	3
206	Kab. Pasuruan		v	v	2
207	Kab. Ponorogo		v	v	2
208	Kab Probolinggo	v	v	v	3
209	Kab. Sampang		v	v	2
210	Kab. Sidoarjo	v		v	2
211	Kab. Situbondo		v	v	2
212	Kab Sumenep	v	v	v	3
213	Kab .Trenggalek		v	v	2

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
214	Kab Tuban	v	v	v	3
215	Kab Tulungagung	v	v	v	3
216	Kota Blitar	v	v	v	3
217	Kota Kediri		v	v	2
218	Kota Madiun	v	v	v	3
219	Kota Malang		v	v	2
220	Kota Mojokerto	v	v	v	3
221	Kota Pasuruan		v	v	2
222	Kota Probolinggo	v	v	v	3
223	Kota Surabaya			v	1
	Propinsi Banten				
224	Kab Lebak	v	v	v	3
225	Kab Pandeglang	v			1
226	Kab Serang	v	v	v	3
227	Kab Tangerang	v	v	v	3
228	Kota Cilegon		v		1
229	Kota Tangerang	v	v	v	3
	Propinsi Bali				
230	Kab. Badung		v	v	2
231	Kab Bangli	v	v	v	3
232	Kab Buleleng	v	v		2
233	Kab Gianyar	v	v	v	3
234	Kab Karangasem	v	v		2
235	Kab Klungkung	v	v	v	3
236	Kab Tabanan	v	v	v	3
237	Kota Denpasar	v	v	v	3
	Propinsi Nusa Tenggara Barat				
238	Kab Bima	v	v	v	3
239	Kab Lombok Barat	v	v	v	3
240	Kab Lombok Tengah	v	v	v	3
241	Kab Lombok Timur	v	v	v	3
242	Kab Sumbawa	v	v	v	3
243	Kab Sumbawa Barat	v	v		2
244	Kota Mataram	v	v	v	3
	Propinsi Nusa Tenggara Timur				
245	Kab Alor	v			1
246	Kab Belu	v	v	v	3
247	Kab Ende	v			1

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
248	Kab Flores Timur	v			1
249	Kab Lembata	v			1
250	Kab Manggarai	v			1
251	Kab Manggarai Barat	v			1
252	Kab Ngada	v			1
253	Kab Rote Ndao	v			1
254	Kab Sikka	v			1
255	Kab Sumba Barat	v			1
256	Kab. Sumba Barat Daya	v		v	2
257	Kab Sumba Timur	v			1
258	Kab Timor Tengah Selatan	v			1
259	Kota Kupang			v	1
	Propinsi Kalimantan Barat				
260	Kab. Ketapang	v	v	v	3
261	Kab. Pontianak	v	v	v	3
262	Kab. Sambas	v	v	v	3
263	Kab. Sanggau	v	v	v	3
264	Kab. Sintang	v	v		2
265	Kota Pontianak		v	v	2
266	Kota Singkawang	v		v	2
	Propinsi Kalimantan Tengah				
267	Kab. Kapuas		v	v	2
268	Kab Katingan	v	v		2
269	Kab. Kotawaringin Barat	v		v	2
270	Kab. Sukamara	v		v	2
271	Kota Palangkaraya	v			1
	Propinsi Kalimantan Selatan				
272	Kab Balangan	v	v		2
273	Kab Banjar	v			1
274	Kab. Hulu Sungai Selatan		v	v	2
275	Kab. Hulu Sungai Tengah	v	v		2
276	Kab. Hulu Sungai Utara		v	v	2
277	Kab Kotabaru	v			1
278	Kab Tabalong	v	v		2
279	Kab. Tanah Bumbu	v	v		2
280	Kab. Tanah Laut	v	v	v	3
281	Kab. Tapin	v	v	v	3
282	Kota Banjarbaru	v	v		2
283	Kota Banjarmasin	v	v		2

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
	Propinsi Kalimantan Timur				
284	Kab Malinau		v		1
285	Kab Nunukan	v			1
286	Kab. Berau			v	1
287	Kota Balikpapan		v		1
288	Kota Bontang		v		1
289	Kota Tarakan		v	v	2
	Propinsi Sulawesi Utara				
290	Kab Bolaang Mongondow	v	v		2
291	Kep Kep Sangihe	v			1
292	Kab Minahasa		v		1
293	Kab Minahasa Utara	v	v		2
294	Kota Bitung	v	v		2
	Propinsi Sulawesi Tengah				
295	Kab. Banggai		v	v	2
296	Kab. Banggai Kepulauan			v	1
297	Kab. Donggala		v	v	2
298	Kab. Morowali			v	1
299	Kab Parigi Moutong	v			1
300	Kab. Poso			v	1
301	Kab. Tojo Una-Una	v	v	v	3
302	Kab. Toli-Toli	v			1
303	Kota Palu			v	1
	Propinsi Sulawesi Selatan				
304	Kab Bantaeng	v	v		2
305	Kab Barru	v	v		2
306	Kab. Bone	v	v	v	3
307	Kab. Bulukumba	v	v	v	3
308	Kab. Enrekang	v	v	v	3
309	Kab. Gowa	v	v	v	3
310	Kab Jenepono		v		1
311	Kab Kep Selayar		v		1
312	Kab Luwu	v	v		2
313	Kab. Luwu Timur	v	v	v	3
314	Kab. Luwu Utara	v	v		2
315	Kab. Pangkajene Dan Kepulauan	v	v	v	3
316	Kab. Pinrang	v	v	v	3
318	Kab Sinjai	v	v		2
317	Kab. Sidenreng Rappang	v	v		2

(Lanjutan)

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	Total
319	Kab Soppeng	v	v		2
320	Kab Takalar	v	v		2
321	Kab. Tana Toraja	v	v	v	3
322	Kab. Wajo	v	v	v	3
323	Kota Makassar	v	v		2
324	Kota Palopo	v			1
325	Kota Pare-Pare	v	v		2
	Propinsi Sulawesi Tenggara				
326	Kab. Buton	v	v	v	3
327	Kab. Kolaka			v	1
328	Kab. Kolaka Utara		v		1
329	Kota Kendari		v		1
	Propinsi Gorontalo				
330	Kab. Boalemo	v	v	v	3
331	Kab. Bone Bolango		v		1
332	Kab. Gorontalo	v		v	2
333	Kab. Pohuwato	v			1
334	Kota Gorontalo		v	v	2
	Propinsi Sulawesi Barat				
335	Kab. Mamuju		v	v	2
336	Kab Majene	v			1
337	Kab. Mamasa	v	v	v	3
338	Kab. Mamuju Utara		v	v	2
339	Kab. Polewali Mandar	v	v	v	3
	Propinsi Maluku Utara				
340	Kota Tidore Kepulauan		v		1
	Propinsi Papua				
341	Kab. Asmat			v	1
342	Kab Biak Numfor		v		1
343	Kab Jayapura	v	v	v	3
344	Kab Mimika		v		1
345	Kab Pegunungan Bintang	v	v		2
346	Kab Sarmi	v			1
347	Kota Jayapura	v	v		2
	Propinsi Papua Barat				
348	Kab Fakfak	v			1
349	Kota Sorong	v	v		2
	Total	268	284	248	800